



e-ISSN 3030-9654
p-ISSN 3026-4804

JURNAL SEMARAK KABUMIAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen

Hendri Hermawan Adinugraha
Muhammad Khoirul Fikri
Rizky Andrean

Enhancing Guide Competence for Sensory-Disabled Tourists at Nglanggeran Geosite

Angeline Louisabethania
Wahyu Arianto

Sinergi SDM dan Ekonomi Kreatif untuk Geowisata Berkelanjutan di Geopark Kebumen

Dwi Scativana Isnaeni

Analysis of The Role of The Pasir Village Community in Preserving The Guyuban Tradition

Asyam Putra Rayzan
Abra Atha Biyan
Inayahi Bharnas

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM untuk Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Eka Wati Setyaningsih



Volume 3, No 2, Desember 2025

JURNAL SEMARAK KABUMIAN

Volume 3 No 2

Diterbitkan oleh:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
Penanggung Jawab:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen
Ketua Penyunting:	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Anggota Dewan Penyunting:	Jinggarani Rosmala Dewi,. S.IP, MPA Aulia Ni'matu Fajar, S.H., M.H. Kabul Trifiyanto, SE, MBA
Mitra Bestari:	H. Sarwono, M.Kes Dr. Irfan Helmi, S.E, M.M Sigit Triwibowo, S.Pd Mukhsinun, S.H.I, M.E.I Sotya Partiwidi Ediwijoyo, M.M Taukhid, SE Aulia Rahmawati, M.P., C.Ed Ari Susanto, SIP Siti Fatimah, M.Pd Muna Fauziah, M.Pd Dr. Umi Arifah, S.Pd.I, M.M Dr. Siti Nur Azizah S.E., M.M
Sekretariat:	Ita Purnamasari, S.Pd
Desain Grafis:	Zakiyal Fikri, S.T
Pengiriman Jurnal:	BAPPERIDA Kabupaten Kebumen Jalan Merdeka Nomor 2 Gedung F Kompleks Setda Kabupaten Kebumen 54311 Telepon (0287) 381570

DAFTAR ISI

Praktik *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen

Hendri Hermawan Adinugraha
Muhammad Khoirul Fikri
Rizky Andrean

Hal 1 - 20

Enhancing Guide Competence for Sensory-Disabled Tourists at Nglanggeran Geosite

Angeline Louisabethania
Wahyu Arianto

Hal 21 - 29

Sinergi SDM dan Ekonomi Kreatif untuk Geowisata Berkelanjutan di Geopark Kebumen

Dwi Scativana Isnaeni

Hal 30 - 40

Analysis of The Role of The Pasir Village Community in Preserving The Guyuban Tradition

Asyam Putra Rayzan
Abra Atha Biyan
Inayahi Bharnas

Hal 41 - 47

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM untuk Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Eka Wati Setiyaningsih

Hal 48 - 60

Praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Keberlanjutan Destinasi Pariwisata Religi di Kebumen

Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices in the Sustainability of Religious Tourism Destinations in Kebumen

Hendri Hermawan Adinugraha^{1) a)*}, Muhammad Khoirul Fikri^{2) b)}, Rizky Andrean^{3) c)}

¹⁾ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

a) Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

²⁾ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

b) Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

³⁾ Universiti Utara Malaysia

c) Sintok, 06010 Bukit Kayu Hitam, Kedah, Malaysia

*Email: hendri.hermawan@uingusdur.ac.id

Naskah Masuk: 26 Juni 2025 Naskah Revisi: 31 Oktober 2025 Naskah Diterima: 27 November 2025

ABSTRACT

This study aimed to analyze the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) values in the management of religious tourism destinations in Kebumen. Using a descriptive qualitative, data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies at religious tourism sites. The results indicated that ESG implementation remains partial: the social aspect demonstrates significant community involvement but lacks inclusivity; the environmental aspect is often neglected, particularly in waste management and resource conservation; while religious values dominate the governance aspect, it lacks transparent and participatory managerial systems. These findings indicated a gap between the potential of local spirituality and systematic sustainability practices. The implications of this research included the need for policy design that integrates ESG into community-based strategic tourism planning. The originality of this research lies in its integration of religious values with ESG principles to develop adaptive and inclusive destination governance within the local context of Kebumen Regency. The integrated ESG model combined spiritual values and local wisdom in three dimensions of sustainability: religious ethics-based environmental conservation, community-based inclusive social empowerment, and participatory and transparent governance, achieved through collaboration between the government, religious leaders, and local communities in Kebumen.

Keywords: environment, governance, religious tourism, social.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan nilai Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di lokasi-lokasi utama wisata religi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG masih parsial: aspek sosial menunjukkan keterlibatan masyarakat cukup tinggi, namun belum inklusif; aspek lingkungan cenderung diabaikan, terutama dalam pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya; sementara aspek governance didominasi oleh nilai religius tetapi belum diimbangi oleh sistem manajerial yang transparan dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi spiritualitas lokal dan praktik keberlanjutan yang sistematis. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa usulan model integratif ESG berbasis kearifan lokal dan Spiritual Ecosystem Services sebagai pendekatan alternatif dalam pengembangan destinasi religi. Implikasi riset ini mencakup perlunya desain kebijakan yang mengintegrasikan ESG dalam perencanaan strategis pariwisata berbasis komunitas. Originalitas penelitian ini terletak pada penyatuan nilai religius dengan prinsip ESG untuk membangun tata kelola destinasi yang adaptif dan inklusif. Model ESG integratif yang ditemukan menggabungkan nilai spiritual dan kearifan lokal dalam tiga dimensi keberlanjutan yaitu konservasi lingkungan berbasis etika religius, pemberdayaan sosial inklusif berbasis komunitas, tata kelola partisipatif dan transparan melalui kolaborasi pemerintah, tokoh agama, masyarakat lokal di Kebumen.

Kata kunci: lingkungan, pariwisata religi, sosial, tata kelola.

PENDAHULUAN

Kebumen, sebuah kabupaten di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata religi yang berkelanjutan. Beberapa destinasi religi seperti Makam Wali Syekh Maulana Malik Ibrahim, Masjid Agung Kauman, dan berbagai pesantren tua yang sarat nilai spiritual menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan regional. Akan tetapi, keberlanjutan destinasi-destinasi tersebut menghadapi tantangan kompleks akibat tekanan lingkungan, dinamika sosial, dan lemahnya tata kelola (Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, 2025). Saat ini, para pemangku kepentingan global, mulai dari investor hingga wisatawan, semakin menjadikan metrik keberlanjutan sebagai syarat mutlak. Krisis iklim telah meningkatkan risiko fisik terhadap situs-situs bersejarah, sementara ketimpangan sosial dan skandal tata kelola dapat merusak reputasi dan memicu boikot

wisatawan, menjadikan keterlambatan adopsi kerangka kerja keberlanjutan bukan lagi opsi, melainkan ancaman finansial dan eksistensial bagi pariwisata Kebumen. Dalam hal inilah, pendekatan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi relevan sebagai kerangka evaluasi dan pengembangan yang lebih komprehensif dalam manajemen destinasi pariwisata religi (Rocca & Zielinski, 2022; Yuan et al., 2023; Legendre et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena ESG menawarkan kerangka kerja yang terukur, terintegrasi, dan holistik, berbeda dengan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang cenderung bersifat filantropis dan terpisah, atau tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang luas. ESG secara spesifik menerjemahkan prinsip keberlanjutan menjadi metrik risiko dan peluang investasi yang secara langsung dinilai oleh pasar, menjadikannya kunci untuk transisi menuju pariwisata yang benar-benar resilien dan kompetitif.

Tabel 1.

Data Kunjungan Wisata Religi dan Indikator ESG di Kabupaten Kebumen

Tahun	Jumlah Wisatawan Religi	Ketersediaan Fasilitas Ramah Lingkungan (%)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan (%)	Skor Tata Kelola (Governance)*
2019	27.600	40%	30%	2,7 dari 5
2020	12.400	42%	25%	2,5 dari 5
2021	18.900	45%	29%	2,6 dari 5
2022	30.500	46%	32%	2,8 dari 5
2023	36.800	48%	33%	2,9 dari 5

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa data kunjungan wisatawan religi di Kabupaten Kebumen menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi, melonjak dari titik terendah 12.400 kunjungan di tahun 2020 menjadi 36.800 kunjungan di tahun 2023 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen, 2024). Namun, pertumbuhan kunjungan ini harus dicermati seiring dengan tren tiga pilar keberlanjutan yang diukur melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Dari aspek Lingkungan (E), yang diukur dari persentase Ketersediaan Fasilitas Ramah Lingkungan, meliputi ketersediaan sarana pengelolaan limbah, konservasi energi/air, dan infrastruktur hijau lainnya terjadi peningkatan perlahan dari 40% (2019) menjadi 48% (2023). Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh destinasi (52%) masih kekurangan fasilitas esensial untuk meminimalisir dampak

lingkungan, yang menjadi tantangan besar dalam mencapai kelestarian.

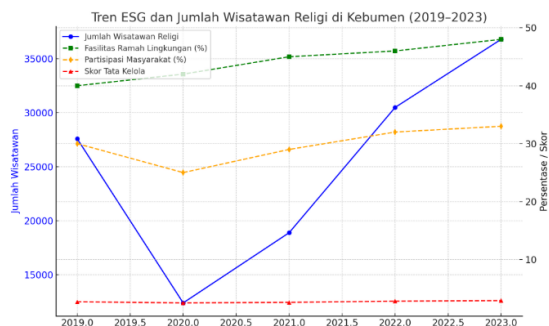
Pada pilar Sosial (S), yang diukur dari persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan mencakup keterlibatan aktif komunitas lokal dalam perencanaan dan manfaat ekonomi destinasi menunjukkan peningkatan dari 30% (2019) menjadi 33% (2023) (setelah sempat anjlok di 2020). Capaian 33% ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dan kepemilikan masyarakat lokal masih tergolong rendah, berpotensi menghambat keberlanjutan sosial destinasi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual.

Pilar Tata Kelola (G), yang diukur melalui Skor Tata Kelola (1-5) mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan menjadi perhatian terbesar. Dengan skor tertinggi hanya 2,9 dari 5 di tahun 2023, menunjukkan bahwa kualitas tata kelola secara konsisten berada dalam kategori Kurang/Cukup

Rendah (2,0–2,9). Kesenjangan tata kelola ini mengindikasikan bahwa fondasi manajemen, koordinasi antar-pihak, dan kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial masih lemah, yang pada akhirnya berisiko menghambat percepatan perbaikan di pilar E dan S, serta mengancam daya tahan pariwisata religi Kebumen dalam jangka panjang.

Skor Tata Kelola (*Governance*) diambil dari indeks internal Dinas Pariwisata yang mengukur transparansi, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan sistem pengawasan berbasis indikator *Good Governance*.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan tren jumlah wisatawan religi dan indikator ESG (fasilitas ramah lingkungan, partisipasi masyarakat, dan skor tata kelola) di Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan dinamika perkembangan destinasi wisata religi dan menunjukkan pentingnya pendekatan keberlanjutan berbasis ESG.



Gambar 1.

Tren ESG dan Jumlah Wisatawan di Kebumen
 Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (2024)

Fenomena di atas menunjukkan bahwa lonjakan wisatawan belum dibarengi dengan peningkatan signifikan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola destinasi. Inilah yang menjadikan penting untuk mengkaji penerapan praktik ESG dalam kajian pariwisata religi di Kebumen, guna mengoptimalkan keberlanjutan jangka panjang dan meningkatkan daya saing destinasi. ESG merupakan kerangka kerja strategis yang telah digunakan luas dalam dunia bisnis dan investasi, dan kini mulai diadopsi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Tong et al., 2022; Dempere & Modugu, 2022).

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka mengingat masih minimnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan ESG ke dalam pengelolaan destinasi wisata religi,

khususnya di daerah yang berbasis komunitas seperti Kebumen. Selama ini, penelitian pariwisata religi lebih banyak terfokus pada aspek spiritualitas, potensi budaya, atau promosi destinasi (Juliana et al., 2023). Padahal, tantangan nyata di lapangan melibatkan keberlanjutan lingkungan (misalnya pengelolaan sampah peziarah), ketimpangan sosial (minimnya pelibatan warga lokal), dan lemahnya *Governance* (tidak adanya standar atau indikator keberlanjutan) (Rhama, 2022).

Problem riset yang muncul adalah absennya integrasi praktik ESG secara sistematis dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Gap riset yang teridentifikasi meliputi ketiadaan instrumen evaluasi ESG yang kontekstual terhadap nilai-nilai lokal, lemahnya keterlibatan aktor-aktor lokal dalam proses *Governance*, serta tidak optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan komunitas keagamaan dalam menjamin keberlanjutan destinasi. Oleh karena itu, perlu adanya model pendekatan ESG yang tidak hanya adaptif terhadap literatur lokal, tetapi juga responsif terhadap tantangan pembangunan pariwisata berbasis nilai spiritual.

Kajian ini memanfaatkan teori *Sustainable Tourism Development* serta kerangka ESG dari World Economic Forum (2024) sebagai landasan teoritik. Teori ini menekankan bahwa pariwisata yang berkelanjutan harus mempertimbangkan keterkaitan antara konservasi lingkungan, pembangunan sosial, dan tata kelola yang efektif (Jung et al., 2024). Dalam kajian wisata religi, teori tersebut diperluas dengan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* (SES) yang melihat bahwa destinasi religi bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga sumber nilai transendental dan kohesi sosial (Mihalic, 2024).

Beberapa riset terdahulu yang relevan telah dilakukan, di antaranya oleh Adinugraha et al. (2023) yang mengkaji keberlanjutan wisata halal berbasis komunitas, serta penelitian dari Sholehuddin et al. (2021) yang menyoroti tata kelola berbasis nilai kearifan lokal di destinasi religi di Indonesia. Akan tetapi, kajian-kajian tersebut belum mengaitkan secara eksplisit penerapan prinsip ESG dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Demikian pula, pendekatan ESG dalam wisata religi di kabupaten tingkat dua seperti Kebumen masih sangat minim, baik dalam literatur nasional maupun internasional.

Padahal, tantangan tata kelola dan keterbatasan sumber daya di tingkat lokal membutuhkan model yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis nilai.

Pendekatan ESG penting dalam konteks pariwisata religi karena ia merupakan kerangka atau standar yang digunakan untuk menilai tanggung jawab dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata religi di Kabupaten Kebumen. Pendekatan ESG bertujuan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang bisnis, mengurangi risiko non-keuangan (seperti reputasi dan hukum), menarik investor yang peduli pada dampak sosial dan lingkungan, dan memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, menerapkan pendekatan ESG dalam pengelolaan obyek wisata religi sangat penting agar kegiatan wisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam, nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual di Kabupaten Kebumen.

Riset ini menjadi penting karena dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model pengelolaan destinasi wisata religi berbasis ESG yang kontekstual. Kajian ini diharapkan mampu memberi arah kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam program pengembangan pariwisata. Di sisi lain, penelitian ini berpotensi menjadi rujukan ilmiah bagi pengelola wisata religi, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dalam merancang intervensi berbasis data dan teori yang kuat. Pada kajian global, penelitian ini juga relevan sebagai bagian dari pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-11 (kota dan komunitas berkelanjutan) dan ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) (Adinugraha, Nasarruddin, Shulthoni, et al., 2023).

Integrasi praktik ESG dalam pengelolaan destinasi wisata religi mampu menciptakan keseimbangan antara spiritualitas, keberlanjutan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat (Khusairi et al., 2023). Oleh karena itu, kajian ini bukan sekadar mengevaluasi praktik yang ada, tetapi juga berupaya membangun kerangka kerja konseptual dan aplikatif yang mampu menjembatani nilai-nilai religius dengan prinsip keberlanjutan global. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk

menganalisis penerapan praktik ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam keberlanjutan destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen, serta merumuskan strategi pengelolaan yang adaptif terhadap tantangan lokal dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan global.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep ESG dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kajian tentang keberlanjutan dalam pariwisata telah berkembang secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Dalam kerangka tersebut, pendekatan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) menjadi salah satu dimensi penting yang semakin diperhatikan, terutama dalam praktik pembangunan berkelanjutan termasuk di sektor pariwisata. ESG merupakan suatu pendekatan evaluatif yang mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, kontribusi sosial, serta tata kelola yang baik sebagai satu kesatuan prinsip keberlanjutan (Lin et al., 2024; García et al., 2024). Prinsip ESG pada destinasi wisata religi mampu memberi arah baru dalam merancang tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi dan spiritual, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem, inklusivitas sosial, serta kepemimpinan kolaboratif.

Dimensi *Environmental* dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Religi

Dimensi *Environmental* dalam ESG mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan. Isu ini pada wisata religi menjadi krusial karena kegiatan peziarahan yang masif dapat menghasilkan volume sampah tinggi, tekanan terhadap kawasan konservasi, serta pencemaran air dan udara (Khan et al., 2021). Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang berbasis prinsip konservasi dan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan agar destinasi tidak mengalami degradasi ekologis.

Dimensi *Social* dalam Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Dimensi *Social* merujuk pada relasi antara destinasi dengan masyarakat lokal, mencakup aspek inklusi sosial, keadilan ekonomi, pelestarian budaya, serta pemberdayaan

komunitas (Solazzo et al., 2022). Dalam pariwisata religi, masyarakat lokal sering menjadi pelaku utama yang menopang operasional destinasi, baik sebagai penjaga situs, penyedia jasa akomodasi, maupun pelaku ekonomi informal. Akan tetapi, tanpa sistem sosial yang adil dan partisipatif, mereka rentan mengalami marginalisasi akibat komersialisasi pariwisata yang eksploitatif (Mandić & Kennell, 2021). Pendekatan ESG mendorong pentingnya menciptakan relasi yang adil antara pemangku kepentingan, serta memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan wisata religi.

Dimensi Governance dalam Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Dimensi *Governance* dalam ESG menekankan pentingnya tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan adaptif. *Governance* dalam pariwisata tidak hanya terkait regulasi, tetapi juga mencakup distribusi peran antaraktor, sistem koordinasi, serta mekanisme kontrol sosial dan institusional. Penelitian oleh Lestari et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola destinasi pariwisata yang baik akan meningkatkan kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi tekanan eksternal seperti krisis ekonomi, bencana, atau konflik sosial. *Governance* pada wisata religi berbasis nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal juga menjadi pilar penting untuk menjaga legitimasi destinasi di mata peziarah.

Penggabungan ketiga dimensi ESG ini telah menjadi model evaluasi keberlanjutan yang diterapkan secara luas dalam sektor korporat dan mulai diadopsi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hassan & Meyer (2022) menegaskan bahwa penerapan ESG dalam industri pariwisata dapat menjadi alat ukur baru untuk mengevaluasi keberlanjutan destinasi, serta mengurangi risiko sosial dan lingkungan yang berdampak terhadap reputasi dan daya saing. Meskipun begitu, penelitian yang secara spesifik membahas integrasi ESG dalam pariwisata religi masih sangat terbatas, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan sebagai Kerangka Analisis

Teori utama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori *Sustainable Tourism*

Development (Yoopetch et al., 2023). Teori ini menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kesinambungan antara kepuasan wisatawan, pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kemampuan daya dukung destinasi dalam jangka panjang. Teori ini mengintegrasikan tiga pilar utama yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial ke dalam model pembangunan pariwisata. Ketiga pilar tersebut pada ESG dapat dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur, sehingga memudahkan proses evaluasi dan implementasi.

Pendekatan Spiritual Ecosystem Services pada Wisata Religi

Kajian ini juga menggunakan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* (SES) untuk memahami dimensi keagamaan sebagai bagian dari lanskap sosial dan ekologis destinasi religi. Pendekatan ini menekankan bahwa destinasi religi tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga menyimpan nilai spiritual yang dapat memperkuat ikatan sosial dan kepekaan terhadap alam (W. Wang et al., 2023). Hal ini penting untuk mendasari praktik ESG yang tidak sekadar teknokratis, tetapi juga etis dan berbasis pada nilai transendental.

Penelitian sebelumnya oleh Peristiwa (2023) tentang pariwisata religi di Indonesia menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam tata kelola destinasi untuk menjaga kesinambungan aktivitas keagamaan dan ekonomi. Penelitian Ali et al. (2019) di kawasan religi di Bandar Lampung juga menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat lokal, terutama dalam menjaga otentisitas spiritual sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Kedua penelitian tersebut belum mengintegrasikan secara eksplisit pendekatan ESG dalam kerangka analisisnya, sehingga menyisakan ruang untuk inovasi konseptual dan metodologis dalam penelitian ini. Dalam penelitian lain, Pramezwary et al. (2024) mengusulkan kerangka keberlanjutan destinasi berbasis ESG yang menggabungkan indikator-indikator spesifik seperti efisiensi energi, inklusi gender, kebijakan antikorupsi, serta keberadaan sistem evaluasi dan pelaporan. Penelitian mereka memberikan kontribusi penting dalam memperluas dimensi keberlanjutan yang

sebelumnya terlalu menitikberatkan pada aspek ekologi dan ekonomi semata. Kerangka ini menjadi relevan untuk diadaptasi dalam kajian lokal seperti Kebumen, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan spiritual yang khas.

ESG dalam pariwisata juga dikaji oleh Ionescu et al. (2019) yang menyatakan bahwa destinasi wisata perlu mengadopsi model ESG secara holistik sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, mengelola risiko, dan membangun kepercayaan publik. Penelitian mereka menunjukkan bahwa destinasi yang menerapkan ESG secara konsisten cenderung memiliki reputasi lebih baik, serta lebih resilien terhadap perubahan pasar dan regulasi. Hasil penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa ESG bukan hanya kerangka evaluatif, tetapi juga strategi pembangunan yang visioner.

Integrasi ESG dalam sektor pariwisata di Indonesia masih dalam tahap awal dan belum merata di seluruh wilayah. Beberapa inisiatif pemerintah daerah menunjukkan arah yang positif, tetapi masih terbatas pada aspek lingkungan seperti penghijauan kawasan wisata dan pengelolaan sampah. Aspek sosial dan *Governance* sering kali terpinggirkan akibat kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan terintegrasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui desain kebijakan dan program berbasis ESG yang kontekstual dan partisipatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi merupakan bidang kajian yang masih berkembang dan membutuhkan eksplorasi lebih lanjut, terutama dalam kajian lokal seperti Kabupaten Kebumen. Penggabungan teori keberlanjutan dan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* menjadi landasan teoritik yang kuat dalam membangun kerangka analisis yang holistik. Tinjauan literatur ini juga menunjukkan adanya kesenjangan riset dalam hal penerapan ESG secara praktis dan adaptif di destinasi-destinasi religi yang berbasis komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual, empiris, dan praktis terhadap pengembangan destinasi pariwisata religi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi melalui pendekatan ESG.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam praktik integrasi nilai-nilai ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Penelitian ini dilakukan selama periode Januari hingga April 2025 di beberapa lokasi utama destinasi religi, seperti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, Masjid Agung Kauman, dan sentra UMKM religius di Kecamatan Kebumen dan Mirit. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial, makna simbolik, serta dinamika praktik ESG dalam kajian lokal dan spiritualitas yang kompleks. Sebagai bukti, data kuantitatif BPS hanya menunjukkan skor agregat ESG yang rendah (misalnya, skor Tata Kelola 2,9 dari 5 pada tahun 2023), tetapi gagal menjelaskan mengapa skor tersebut rendah. Oleh karena itu, penelitian ini mutlak memerlukan pendekatan kualitatif interpretatif, seperti analisis kebijakan, studi kasus implementasi, dan wawancara mendalam dengan para pengelola, tokoh masyarakat, dan wisatawan. Pendekatan ini adalah satu-satunya cara untuk menggali *causal mechanism* (mekanisme kausal) yang tersembunyi, yaitu untuk mengungkap perspektif riil, hambatan komunikasi, dan konflik kepentingan yang menjadi akar lemahnya implementasi ESG di lapangan, suatu hal yang tidak mungkin didapatkan dari survei atau data statistik semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan, interaksi sosial masyarakat lokal, dan proses pengambilan keputusan dalam tata kelola destinasi. Wawancara ini melibatkan 15 informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan peran aktif mereka dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Informan terdiri atas pengelola wisata, tokoh agama, pelaku UMKM religius, perangkat desa, dan perwakilan Dinas Pariwisata. Studi dokumentasi meliputi analisis terhadap peraturan daerah, dokumen rencana pengelolaan destinasi, serta laporan program CSR dan keberlanjutan dari pelaku usaha lokal.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder seperti laporan

pemerintah daerah, arsip media lokal, dan publikasi akademik terkait ESG dan pariwisata religi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengidentifikasi pola-pola tematik yang berkaitan dengan integrasi ESG dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta membandingkan temuan lapangan dengan teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik serta member checking kepada informan utama. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman kontekstual dan holistik atas praktik ESG sebagai strategi keberlanjutan destinasi wisata religi di Kebumen.

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta melakukan *member checking* kepada informan utama guna memastikan kesesuaian interpretasi hasil dengan pengalaman empiris mereka untuk menjaga keabsahan data. Pendekatan ini menghasilkan validitas yang kuat dan pemahaman holistik atas praktik integrasi nilai ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi di Kebumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aspek Lingkungan dalam Destinasi Wisata Religi di Kebumen

Pengelolaan sampah di destinasi wisata religi di Kebumen belum dilakukan secara sistematis dan terpadu. Sebagian besar pengelolaan sampah masih bersifat tradisional dan bergantung pada inisiatif masyarakat atau pengurus tempat ibadah. Tempat-tempat seperti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Masjid Agung Kauman menerima kunjungan tinggi, terutama pada momen keagamaan tertentu, tetapi tidak memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Sampah sisa makanan, plastik, dan kertas banyak ditemukan di sekitar area peziarahan dan fasilitas umum.

Ditinjau dari aspek konservasi air dan energi, sebagian besar destinasi belum menerapkan praktik efisiensi secara optimal. Air masih digunakan secara berlebihan, terutama untuk kebutuhan wudhu dan kebersihan, tanpa sistem resirkulasi atau konservasi. Sementara

itu, penggunaan energi listrik di area masjid dan penginapan sekitar destinasi belum didukung oleh teknologi hemat energi atau penggunaan sumber energi terbarukan. Hanya beberapa pesantren yang mulai memanfaatkan panel surya dalam skala terbatas untuk penerangan malam hari.

Perlindungan terhadap kawasan sakral dan alami juga belum menjadi bagian dari kebijakan pariwisata secara eksplisit. Beberapa lokasi wisata religi yang berada di dekat kawasan konservasi alam atau situs bersejarah tidak memiliki sistem zonasi atau pembatasan aktivitas pengunjung. Di Makam Wali di Kecamatan Karanggayam misalnya, area hutan kecil di sekitarnya mulai terganggu oleh pembangunan fasilitas parkir dan kios oleh pihak luar tanpa koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga dalam menjaga ekosistem lokal yang menjadi bagian integral dari nilai spiritual destinasi.

Temuan-temuan di atas mengindikasikan bahwa meskipun destinasi wisata religi di Kebumen memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan, penerapan aspek lingkungan dalam pengelolaan masih bersifat reaktif, tidak terstruktur, dan belum menjadi bagian dari sistem manajemen destinasi secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa prinsip *Environmental sustainability* dalam ESG belum dijadikan indikator wajib dalam pengembangan pariwisata lokal.

Kurangnya integrasi antara pengelolaan pariwisata dan kebijakan lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang mengancam keberlangsungan destinasi religi itu sendiri. Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah wisatawan dan kapasitas lingkungan akan memicu penurunan kualitas kawasan sakral, menurunkan kenyamanan pengunjung, serta mengurangi nilai spiritual destinasi yang seharusnya dijaga.

Penggunaan berlebihan tanpa strategi efisiensi memperlihatkan belum adanya kesadaran ekologis di kalangan pengelola dan pengunjung apabila dilihat dari kajian konservasi air dan energi. Hal ini bertentangan dengan prinsip konservasi yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam agar tetap lestari. Sementara itu, pembangunan infrastruktur tanpa kajian lingkungan, seperti

pelebaran area parkir di zona vegetasi, berpotensi menimbulkan degradasi habitat

alami dan konflik sosial dengan masyarakat adat atau pemangku kepentingan lokal.

Tabel 2.

Implementasi Aspek Lingkungan (Pilar E) ESG di Wisata Religi Kebumen

Aspek Implementasi (Indikator Kunci ESG)	Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim	Masjid Agung Kauman	Lokasi Lain (E.g., Makam Karanggayam, Pesantren)	Temuan Agregat (Tingkat Kabupaten)
Pengelolaan Sampah	Tidak memadai, pengelolaan tradisional. Sampah (plastik, sisa makanan) banyak ditemukan di area ziarah.	Tidak Memadai. Tidak memiliki infrastruktur pengelolaan terpadu. Bergantung inisiatif pengurus.	Tradisional/Inisiatif. Mayoritas bergantung pada inisiatif masyarakat/pengurus, tidak sistematis dan terpadu.	Reaktif dan tidak terpadu. Tidak ada sistem pengelolaan sampah terstruktur dan terpilah di sebagian besar destinasi.
Konservasi Air dan Energi	Tidak Optimal. Penggunaan air berlebihan untuk wudhu tanpa resirkulasi. Energi listrik belum hemat energi.	Tidak Optimal. Penggunaan air berlebihan tanpa konservasi. Minim penerapan teknologi hemat energi.	Heterogen. Hanya beberapa pesantren yang mulai memanfaatkan panel surya skala terbatas. Sebagian besar belum efisien.	Belum efisien. Mayoritas destinasi belum menerapkan praktik efisiensi air (resirkulasi wudhu) atau teknologi hemat energi secara optimal.
Perlindungan Kawasan Sakral/Alami	Lemah. Pengawasan minim di area sekitar.	Rendah. Tidak ada sistem zonasi eksplisit di sekitar fasilitas umum.	Terancam. Contoh di Karanggayam: Pembangunan parkir dan kios mengganggu kawasan hutan kecil di zona vegetasi tanpa koordinasi.	Lemahnya regulasi dan zonasi. Perlindungan kawasan sakral/alami belum menjadi bagian kebijakan eksplisit; lemahnya pengawasan dan koordinasi pembangunan.
Kesimpulan Implikasi ESG	Risiko degradasi ekologis akibat tingginya kunjungan dan minimnya fasilitas.	Risiko penurunan kualitas kawasan akibat tidak seimbangnya kapasitas lingkungan dengan pemanfaatan.	Risiko konflik sosial dan degradasi habitat akibat pembangunan yang tidak terkontrol dan tanpa kajian lingkungan.	Penerapan belum sistematis. Prinsip Environmental Sustainability belum menjadi indikator wajib, menimbulkan kerusakan ekologis dan konflik sosial-lingkungan.

Sumber: Hasil observasi, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara agregat implementasi sub-aspek Lingkungan (E) ESG pada wisata religi Kebumen berada di tingkat implementasi kurang tepat. Meskipun pengelolaan Sampah dan Konservasi Air/Energi mendominasi kelemahan struktural, isu Perlindungan Kawasan Sakral atau Alami menjadi yang paling kritis karena melibatkan kegagalan koordinasi antar-lembaga dan risiko degradasi habitat permanen

Temuan penelitian ini dapat dielaborasi menggunakan kerangka teori *Environmental Sustainability* dalam kajian pengelolaan pariwisata. Menurut Han (2021), pengelolaan destinasi yang berkelanjutan secara lingkungan mencakup pencegahan polusi, efisiensi sumber daya, pelestarian keanekaragaman hayati, serta perencanaan ruang yang berkelanjutan. Dalam teori tersebut, destinasi seharusnya tidak hanya

menjadi objek ekonomi, tetapi juga entitas ekologis yang harus dilindungi.

Pada kajian wisata religi, nilai-nilai spiritual dapat diperkuat melalui praktik konservasi lingkungan. S. Wang et al. (2023) menyatakan bahwa keterhubungan spiritual dengan alam menjadi faktor penting dalam memperkuat ikatan emosional dan tanggung jawab ekologis pengunjung. Artinya, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di tempat suci bukan hanya soal estetika atau kenyamanan, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap nilai religius itu sendiri.

Aspek spiritual dalam wisata religi justru dapat menjadi jembatan untuk memperkuat kesadaran lingkungan. Misalnya, kampanye untuk mengurangi sampah plastik dapat dikaitkan dengan nilai kesucian dan kebersihan dalam ajaran agama. Pemanfaatan air secara bijak dapat diasosiasikan dengan prinsip taharah (kesucian) dalam Islam, yang mengajarkan moderasi dalam penggunaan air meskipun berada di dekat sumber yang melimpah. Karena itu, pendekatan lingkungan dalam pengelolaan wisata religi harus memadukan prinsip teknis konservasi dengan nilai-nilai religius yang hidup di tengah masyarakat. Model ini sejalan dengan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services* yang memandang bahwa lanskap alam dan situs sakral adalah satu kesatuan fungsi ekologis dan spiritual yang saling menopang (S. Wang & Blasco, 2022).

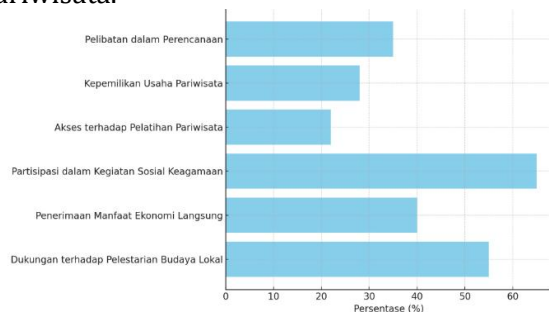
Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Akamavi et al. (2023) yang meneliti dampak kunjungan wisatawan terhadap lingkungan industri. Mereka menemukan bahwa peningkatan jumlah pengunjung tanpa sistem pengelolaan lingkungan yang baik menyebabkan pencemaran dan kerusakan area sekitar makam wali. Penelitian tersebut menegaskan bahwa destinasi religi yang tidak didukung sistem kebersihan dan konservasi yang memadai dapat mengalami degradasi fungsi ekologis dan spiritual. Penelitian oleh Kaharuddin et al. (2020) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan sekitar situs religi menjadi penentu keberhasilan program pariwisata berbasis komunitas. Mereka menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan hanya dapat dicapai jika masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pemantauan, dan edukasi lingkungan. Penelitian dari Nofriya &

Fadhly (2021) juga mendukung pentingnya indikator lingkungan dalam evaluasi destinasi berkelanjutan. Mereka mengembangkan kerangka indikator lingkungan yang meliputi efisiensi energi, pengelolaan air, pengurangan limbah, dan pelestarian ekosistem sebagai bagian dari ESG framework untuk pariwisata. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip lingkungan tidak hanya berlaku untuk destinasi alam atau wisata ekowisata, tetapi juga harus diterapkan pada destinasi berbasis budaya dan spiritual. Temuan lain yang mendukung adalah penelitian Bae (2022) yang menunjukkan bahwa destinasi pariwisata yang mengintegrasikan prinsip ESG secara konsisten, termasuk aspek lingkungan, cenderung memiliki daya tarik yang lebih berkelanjutan, reputasi yang lebih baik, dan risiko sosial-lingkungan yang lebih rendah. Penelitian ini memberi landasan kuat bahwa praktik lingkungan yang baik bukan hanya kewajiban moral dan legal, tetapi juga investasi reputasi jangka panjang bagi destinasi.

Berdasarkan temuan dan hasil riset di atas, implementasi aspek lingkungan dalam destinasi wisata religi di Kebumen masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Tantangan struktural terlihat dari minimnya regulasi lingkungan spesifik dalam kebijakan pariwisata, keterbatasan fasilitas teknis, dan lemahnya kapasitas pengelolaan. Tantangan kultural mencakup rendahnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya lingkungan sebagai bagian dari kesucian tempat ibadah. Perlunya integrasi prinsip lingkungan ke dalam kebijakan pariwisata religi lokal melalui pembentukan indikator ESG berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi khusus yang mengatur standar pengelolaan sampah, air, dan energi di destinasi religi. Edukasi kepada pengunjung melalui pendekatan keagamaan juga harus diperkuat, misalnya dengan menempatkan pesan-pesan agama yang mengajak menjaga kebersihan dan hemat energi di area publik. Pengelola tempat ibadah dan masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan konservasi kawasan melalui program berbasis kearifan lokal dan teknologi sederhana seperti biopori, sumur resapan, dan sistem filtrasi air wudu. Program pelatihan dan pendampingan dari perguruan tinggi serta LSM lingkungan juga dapat menjadi katalisator perubahan perilaku.

Keterlibatan Sosial dan Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Wisata Religi di Kebumen

Tingkat keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara di sejumlah titik wisata religi seperti Makam Ki Bagus Rangin di Karang Sari, Kompleks Makam Kyai Abdurrahman di Mirit, dan Masjid Agung Kauman di Kebumen Kota, ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat berlangsung secara tidak merata dalam berbagai aspek tata kelola. Berikut adalah grafik yang menggambarkan tingkat keterlibatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan wisata religi di Kebumen. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam kegiatan sosial keagamaan dan pelestarian budaya, tetapi masih rendah dalam aspek perencanaan, pelatihan, dan kepemilikan usaha pariwisata.



Gambar 2.

Tingkat Keterlibatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat
Sumber: Hasil observasi, 2025.

Grafik pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program wisata masih rendah, hanya sekitar 35 persen warga yang mengaku pernah dilibatkan dalam forum musyawarah desa atau kegiatan rembuk warga terkait pengembangan destinasi wisata. Sebagian besar warga mengetahui program wisata ketika implementasi sudah berlangsung. Dalam aspek ekonomi, hanya 28 persen warga yang memiliki usaha langsung terkait pariwisata seperti warung makan, penginapan, atau jasa transportasi lokal. Sebanyak 40 persen menyatakan telah memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari keberadaan wisata religi, baik melalui hasil dagangan, jasa parkir, maupun kegiatan pendukung lain. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan yang mendukung wisata religi, seperti ziarah massal, tahlilan akbar, dan haul

ulama, tergolong tinggi mencapai 65 persen. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara kegiatan keagamaan dan aktivitas sosial masyarakat. Dalam hal akses terhadap pelatihan atau penguatan kapasitas pariwisata, hanya 22 persen warga yang pernah mengikuti pelatihan dari pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat. Ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masih belum menyentuh mayoritas warga secara merata. Pada kegiatan pelestarian budaya lokal, seperti seni tradisi, upacara adat, dan narasi sejarah tokoh lokal, terdapat 55 persen responden yang menyatakan aktif mendukung atau terlibat dalam kegiatan tersebut.

Temuan di atas memperlihatkan bahwa keberadaan destinasi wisata religi di Kebumen memang berdampak terhadap aktivitas sosial masyarakat, tetapi belum sepenuhnya berimplikasi kuat pada aspek pemberdayaan ekonomi dan tata kelola yang inklusif. Partisipasi tinggi dalam kegiatan sosial keagamaan menandakan bahwa wisata religi secara kultural telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat, tetapi pemanfaatan potensi ekonomi dan penataan berbasis masyarakat masih kurang optimal.

Pelibatan dalam perencanaan yang hanya mencapai 35 persen menunjukkan bahwa masyarakat belum ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengembangan wisata. Hal ini berpotensi memunculkan resistensi, konflik kepentingan, serta rendahnya rasa memiliki terhadap destinasi. Keterbatasan dalam akses pelatihan juga menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan pariwisata yang diberikan masyarakat, serta memperbesar kesenjangan antar-warga yang sudah terlibat dan yang masih pasif. Tingginya partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan dan pelestarian budaya menjadi modal sosial yang sangat penting. Modal ini dapat menjadi titik masuk strategis untuk memperkuat pemberdayaan berbasis komunitas. Masyarakat dapat terdorong untuk lebih aktif dan mandiri dalam pengelolaan destinasi dengan mengintegrasikan kegiatan religius dan budaya dengan aktivitas ekonomi yang terorganisir.

Temuan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan *Community-Based Tourism* (CBT) dan Teori *Social Capital*. Teori CBT menekankan bahwa keberhasilan pariwisata sangat bergantung pada partisipasi

aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kegiatan pariwisata (Wani et al., 2024). Dalam kerangka ini, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga menjadi pengambil keputusan. Teori ini selaras dengan dimensi sosial dalam kerangka ESG yang mencakup inklusi sosial, keadilan distribusi manfaat, pelibatan komunitas, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Aspek sosial menjadi pondasi keberlanjutan karena menyentuh struktur relasi dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal (Baig et al., 2024).

Teori *Social Capital* menggarisbawahi pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang menopang kerja sama dalam masyarakat (Zmysłony et al., 2020). Tingginya partisipasi masyarakat Kebumen dalam kegiatan keagamaan dan budaya menunjukkan adanya *bonding social capital* yang kuat, tetapi rendahnya pelibatan dalam pengambilan keputusan menandakan lemahnya *bridging* atau *linking capital*, yaitu koneksi masyarakat ke pemerintah dan lembaga lain yang berwenang. Pengembangan wisata religi di Kebumen perlu diarahkan pada model pariwisata berbasis komunitas yang transformatif, yaitu model yang tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat penggerak utama destinasi dengan cara menggabungkan dua kerangka tersebut.

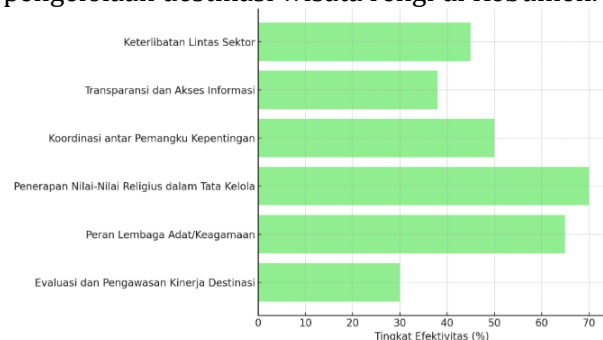
Penelitian ini didukung oleh penelitian Erida et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan wisata religi berbasis masyarakat sangat tergantung pada keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan pengelolaan. Ketika masyarakat hanya dijadikan objek, resistensi dan ketimpangan manfaat menjadi isu utama yang menghambat keberlanjutan. Adinugraha et al. (2020) menegaskan bahwa pelibatan komunitas lokal dalam pengelolaan wisata religi memperkuat identitas budaya dan meningkatkan penghasilan rumah tangga, tetapi harus dilakukan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas agar tidak terjadi dominasi oleh pihak luar. Hidayanti & Fitrianto (2022) dalam penelitiannya juga menjelaskan pentingnya pelestarian narasi tokoh lokal dan budaya spiritual sebagai bagian dari daya tarik wisata religi. Ia menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pelestarian nilai, mereka menjadi lebih memiliki dan menjaga kawasan wisata dari degradasi moral dan komersialisasi berlebihan. Lebih lanjut, Bae

(2022) memperluas pemahaman tentang dimensi sosial ESG dalam pariwisata, termasuk pentingnya indikator partisipasi, keadilan ekonomi, perlindungan hak komunitas, serta pelatihan sebagai bentuk investasi sosial. Penelitian mereka mendukung argumen bahwa dimensi sosial tidak dapat diabaikan dalam menilai keberlanjutan destinasi wisata, termasuk wisata religi.

Keberadaan wisata religi di Kebumen membawa peluang besar dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal, tetapi hal ini memerlukan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan terarah. Pemerintah daerah dan pengelola wisata perlu menyusun *roadmap* pemberdayaan masyarakat yang mencakup pelatihan rutin, mekanisme partisipasi perencanaan terbuka, dan kemitraan strategis antara komunitas dengan pelaku usaha. Pelestarian nilai budaya dan narasi sejarah tokoh-tokoh lokal perlu digarap secara serius melalui media digital, *event* tahunan, dan program edukatif lintas usia. Sinergi antara tokoh agama, budayawan, pemuda, dan pelaku ekonomi akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pariwisata religi yang berdaya, bermakna, dan berkelanjutan secara sosial.

Praktik Tata Kelola (*Governance*) dalam Manajemen Destinasi Wisata Religi

Dinamika tata kelola destinasi wisata religi di Kebumen dengan menelaah enam dimensi utama antara lain keterlibatan lintas sektor, transparansi informasi, koordinasi antar-pemangku kepentingan, internalisasi nilai-nilai religius, peran lembaga adat/keagamaan, dan mekanisme evaluasi serta pengawasan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan efektivitas aspek tata kelola (*Governance*) dalam pengelolaan destinasi wisata religi di Kebumen.



Gambar 3.
Efektivitas Tata Kelola Destinasi Wisata Religi
Sumber: Hasil observasi, 2025.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai religius dan peran lembaga adat/keagamaan mendapat skor efektivitas tertinggi, sementara evaluasi dan pengawasan kinerja destinasi menjadi aspek yang paling lemah. Penerapan nilai-nilai religius dalam tata kelola menjadi aspek yang paling menonjol dengan tingkat efektivitas mencapai 70 persen. Hal ini tercermin dari penggunaan nilai kejujuran, gotong royong, dan amanah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam forum desa, serta dalam penyusunan kegiatan keagamaan tahunan. Nilai religius juga mendorong penguatan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian dan kelestarian destinasi. Peran lembaga adat dan keagamaan menempati urutan kedua dengan skor efektivitas 65 persen. Lembaga ini umumnya menjadi inisiator kegiatan religi dan penjaga narasi sejarah tokoh lokal. Meskipun tidak seluruhnya memiliki struktur formal, lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mediasi konflik sosial dan pengawasan moral dalam aktivitas pariwisata. Koordinasi antar-pemangku kepentingan mencatat efektivitas 50 persen. Temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi berjalan cukup baik di tingkat desa antara tokoh agama, perangkat desa, dan pengelola tempat ibadah, tetapi koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan sektor swasta masih sporadis dan belum berbasis rencana kerja terpadu. Keterlibatan lintas sektor seperti pelibatan BUMDes, koperasi, dan UMKM baru berada pada tingkat efektivitas 45 persen. Banyak inisiatif ekonomi lokal yang berjalan secara individual tanpa koneksi ke jaringan kelembagaan pariwisata kabupaten. Transparansi dan akses informasi masih rendah, dengan tingkat efektivitas hanya 38 persen. Masyarakat umumnya tidak mengetahui secara rinci rencana anggaran pariwisata, perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, atau laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hal ini diperparah oleh minimnya dokumentasi digital dan keterbatasan literasi informasi warga. Yang paling lemah adalah aspek evaluasi dan pengawasan, hanya 30 persen. Tidak ditemukan mekanisme penilaian kinerja secara periodik terhadap pengelolaan destinasi, baik dari sisi fasilitas, pengunjung, maupun kualitas layanan. Evaluasi lebih sering bersifat informal dan tidak terdokumentasi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola destinasi wisata religi di Kebumen lebih banyak ditopang oleh kekuatan nilai dan struktur sosial lokal ketimbang sistem administrasi formal atau perangkat kebijakan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan nilai-nilai religius dan peran lembaga adat membuktikan bahwa *Governance* di tingkat akar rumput masih hidup melalui mekanisme sosial berbasis kepercayaan dan nilai-nilai agama. Efektivitas tata kelola yang tinggi dalam aspek normatif tidak dibarengi oleh efektivitas dalam aspek struktural dan manajerial. Rendahnya transparansi, lemahnya koordinasi formal, dan tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis menjadi indikator adanya kesenjangan antara nilai dan sistem. Kurangnya partisipasi lintas sektor dan rendahnya akses informasi juga menunjukkan bahwa proses tata kelola masih cenderung elitis dan tidak sepenuhnya inklusif. Masyarakat hanya mengetahui sebagian kecil dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang berisiko menciptakan alienasi sosial serta rendahnya rasa memiliki terhadap pengembangan pariwisata. Kelemahan dalam sistem evaluasi menyebabkan stagnasi kualitas layanan. Tanpa data dan sistem pemantauan, sangat sulit untuk mengetahui keberhasilan program, memetakan kekurangan, dan merumuskan strategi perbaikan secara berkelanjutan. Akibatnya, wisata religi cenderung berkembang secara alami tanpa arah pengembangan yang terukur dan terdokumentasi.

Kerangka teoretis dari *Good Governance in Tourism* seperti yang dikembangkan oleh Topcu et al. (2023) memberikan indikator kunci dalam tata kelola destinasi, yaitu transparansi, akuntabilitas, koordinasi lintas sektor, inklusivitas, dan efektivitas pengambilan keputusan. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun destinasi yang berkelanjutan. Nilai-nilai spiritual dan norma lokal memiliki potensi sebagai penguat prinsip tata kelola partisipatif pada pariwisata religi. Hal ini sejalan dengan konsep *Religious Governance* yang dikembangkan oleh Sururi (2020), yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan *'adl* (keadilan) dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola publik. Keberhasilan

penerapan nilai religius harus didukung oleh sistem kelembagaan yang fungsional. Jika tidak, kekuatan nilai tersebut hanya akan menjadi modal sosial tanpa kemampuan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, *Governance* harus dipahami sebagai kombinasi antara nilai, sistem, struktur, dan mekanisme evaluatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Murtayadi et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola destinasi wisata religi yang berhasil selalu melibatkan koordinasi antar-institusi keagamaan dan pemerintah daerah, serta mekanisme evaluasi yang bersifat kolektif. Mereka menekankan pentingnya “tripartit model” antara negara, komunitas, dan pasar sebagai prasyarat tata kelola yang efektif. Penelitian dari M. K. Hassan et al. (2023) memperkuat bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua indikator ESG yang krusial untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dan pencegahan konflik dalam destinasi wisata. Mereka menunjukkan bahwa pengabaian terhadap dua prinsip tersebut seringkali menjadi penyebab utama rusaknya reputasi destinasi dan munculnya ketidakpuasan masyarakat lokal. Slamet et al. (2022) menemukan bahwa nilai religius yang kuat belum tentu menjamin sistem tata kelola yang baik jika tidak ada perangkat kebijakan yang mendukung. Mereka merekomendasikan adanya pelatihan manajemen bagi tokoh agama dan komunitas lokal untuk meningkatkan kapasitas tata kelola. Demikian pula, hasil penelitian Seyfi & Hall (2019) menyatakan bahwa *Governance* tidak cukup hanya berdasarkan niat baik atau nilai tradisional, tetapi memerlukan prosedur tertulis, pembagian peran, indikator kinerja, dan sistem pelaporan publik.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kebumen, perlu membentuk sistem

tata kelola destinasi religi yang berbasis multi-stakeholder *Governance*. Sistem ini harus mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan perangkat manajemen modern seperti sistem pelaporan transparan, forum musyawarah terbuka, dan platform digital partisipatif. Perlu disusun dokumen tata kelola destinasi wisata religi yang berisi pembagian peran, SOP kerja, dan indikator evaluasi yang bisa digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi kinerja destinasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan terbuka, melibatkan tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pihak pemerintah. Penguatan kapasitas tokoh agama dalam hal manajemen, teknologi informasi, dan tata kelola publik menjadi krusial agar mereka tidak hanya menjadi simbol moral, tetapi juga pemimpin strategis dalam pengembangan destinasi. Akhirnya, praktik *Governance* yang diterapkan tidak hanya religius secara nilai, tetapi juga profesional secara sistem. Ini akan menjadikan destinasi wisata religi di Kebumen sebagai model integratif antara spiritualitas dan tata kelola modern.

Integrasi Nilai ESG sebagai Strategi Keberlanjutan Destinasi Wisata Religi

Penelitian ini telah menghasilkan sejumlah temuan penting terkait integrasi nilai-nilai *Environment, Social, and Governance* (ESG) dalam kerangka keberlanjutan destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan pada beberapa situs religi seperti Makam Ki Mangunwijaya, Goa Jatijajar yang bernuansa spiritual, serta sentra UMKM bernuansa religius menunjukkan bahwa integrasi ESG masih bersifat parsial dan belum membentuk kerangka strategis yang utuh.

Tabel 3.
Integrasi ESG pada Destinasi Wisata Religi di Kebumen

Aspek	Lokasi Spesifik: Temuan Riset dan Interpretasi	Kesimpulan Agregat (Tingkat Kabupaten)
Lingkungan (E)	Goa Jatijajar (Spiritual Nuance): Sistem pengelolaan limbah dan konservasi air belum optimal. Situs Ziarah Lain (Misalnya Makam): Masih terdapat praktik pembakaran sampah terbuka di beberapa area sekitar situs.	Aspek paling terabaikan. Pengelolaan lingkungan bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Belum ada penerapan prinsip konservasi lingkungan yang menyeluruh, menimbulkan risiko degradasi ekosistem, terutama di situs alami (gua, sumber air), dan merusak pengalaman spiritual pengunjung.

Sosial (S)	Sentra UMKM Religius: Keterlibatan masyarakat lokal cukup tinggi, terutama dalam aspek pelayanan, kuliner halal, dan pengelolaan <i>homestay</i> . Destinasi Umum (Makam, Goa): Fasilitas aksesibilitas untuk kelompok rentan (disabilitas) terbatas, sehingga aspek inklusivitas sosial belum terpenuhi dengan baik.	Berkembang parsial. Dinamika positif didukung oleh pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi, memanfaatkan aset sosial kuat (tokoh agama). Namun, inklusivitas sosial rendah karena minimnya infrastruktur ramah disabilitas, literasi digital, dan pelatihan berkelanjutan.
Tata Kelola (G)	Umum (Semua Lokasi): Koordinasi antara pemerintah daerah (Dinas Pariwisata), pengelola wisata, dan komunitas keagamaan masih terfragmentasi. Dokumen: Tidak terdapat dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang secara eksplisit mengintegrasikan ketiga nilai ESG.	Kelemahan sentral. Sinergi formal antara pemangku kepentingan tidak ada (fragmentasi koordinasi). Pelaksanaan program keberlanjutan bersifat sektoral dan jangka pendek. Kegagalan utama adalah tidak adanya <i>roadmap</i> atau kebijakan formal ESG yang relevan, menjadikan implementasi nilai ESG tidak menjadi bagian dari visi pembangunan daerah.

Sumber: Hasil observasi, 2025.

Tabel 3 mengindikasikan bahwa integrasi ESG pada destinasi wisata religi Kebumen belum berlangsung secara menyeluruh dan sistematis. Aspek lingkungan merupakan dimensi yang paling terabaikan, padahal keberlanjutan ekosistem sangat penting dalam menunjang kenyamanan dan kelestarian destinasi wisata. Pengelolaan lingkungan yang lemah berpotensi mengganggu pengalaman spiritual pengunjung serta merusak ekosistem lokal, terutama yang berkaitan dengan situs alami seperti gua dan sumber air. Aspek sosial menunjukkan dinamika positif melalui pelibatan masyarakat lokal, tetapi inklusivitas sosial belum sepenuhnya tercapai. Keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal merupakan aset sosial yang kuat, tetapi masih terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur ramah disabilitas, literasi digital, dan pelatihan berkelanjutan untuk pelaku wisata lokal. Dimensi tata kelola menjadi persoalan sentral dalam pembentukan kerangka keberlanjutan destinasi. Tidak adanya sinergi formal antara pemerintah, pengelola, dan komunitas keagamaan menjadikan pelaksanaan program keberlanjutan bersifat sektoral dan jangka pendek. Kurangnya dokumen rencana aksi ESG atau kebijakan turunan yang relevan menyebabkan integrasi nilai ESG tidak menjadi bagian dari visi pembangunan pariwisata daerah.

Menurut kerangka Teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*), keberlanjutan suatu destinasi harus mencakup tiga pilar utama yaitu

keberlanjutan ekologis, sosial-budaya, dan ekonomi yang dikelola dalam tata kelola yang baik (UNWTO, 2023a). Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi ESG di Kebumen masih cenderung memenuhi aspek sosial secara parsial, tetapi belum menjangkau keberlanjutan ekologis dan tata kelola secara komprehensif. Teori ini menekankan pentingnya *stakeholder engagement*, kapasitas kelembagaan, dan *community-based tourism* sebagai landasan penguatan strategi keberlanjutan. Dalam riset di Kebumen, meskipun terdapat pelibatan masyarakat, tetapi kelembagaan destinasi belum cukup kuat. Tanpa mekanisme koordinasi dan evaluasi berbasis ESG, pembangunan destinasi akan tetap bersifat sporadis dan tidak menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingtyas & Koko Andika Pratama (2024) yang menunjukkan bahwa pengabaian terhadap aspek lingkungan dan lemahnya tata kelola menyebabkan penurunan kualitas kunjungan wisata spiritual. Penelitian dari Kwon & Shin (2022) menyatakan bahwa tata kelola destinasi yang tidak berbasis nilai ESG berisiko mempercepat degradasi sosial dan budaya lokal. Penelitian oleh C. P. Lin (2021) menemukan bahwa sinergi antara pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan integrasi ESG. Keberadaan forum multi-aktor serta penyusunan *roadmap ESG-based tourism strategy* terbukti mampu meningkatkan kualitas destinasi sekaligus pelestarian nilai-nilai religius. Laporan UNWTO (2023) menekankan bahwa destinasi religi memiliki potensi sebagai

model pariwisata berkelanjutan jika dikelola dengan memperhatikan keseimbangan antara konservasi lingkungan, pemberdayaan sosial, dan tata kelola yang inklusif. Oleh karena itu, Kebumen sebagai wilayah dengan potensi besar di sektor wisata religi perlu merancang kerangka ESG yang disesuaikan dengan karakter lokalitas dan keagamaan masyarakat.

Berdasarkan analisis temuan, terdapat beberapa tantangan utama dalam proses integrasi nilai ESG di destinasi wisata religi Kebumen. *Pertama*, belum adanya indikator ESG yang terstandarisasi untuk mengukur capaian keberlanjutan di sektor pariwisata. *Kedua*, masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam hal pemahaman ESG, terutama pada aspek lingkungan dan tata kelola. *Ketiga*, lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku wisata, komunitas keagamaan, dan akademisi.

Pemerintah daerah bersama Dinas Pariwisata dapat menyusun guideline ESG untuk destinasi wisata berbasis religius, yang mencakup indikator-indikator keberlanjutan, SOP pengelolaan, dan mekanisme evaluasi berkala. Pendidikan dan pelatihan ESG perlu dilakukan secara intensif bagi para pengelola, masyarakat lokal, dan pelaku UMKM. Di samping itu, forum sinergi antara stakeholder perlu dibentuk untuk merumuskan dan memantau strategi keberlanjutan berbasis ESG secara kolektif dan berkelanjutan. Inovasi teknologi juga dapat dioptimalkan dalam mendukung penerapan ESG. Misalnya, penggunaan aplikasi pelaporan keberlanjutan, pemetaan digital kawasan sensitif lingkungan, serta pemasaran destinasi berbasis nilai-nilai keberlanjutan dan spiritualitas. Pendekatan ini dapat memperkuat daya saing destinasi dan meningkatkan kepuasan wisatawan yang kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam perjalanan mereka (Peeters et al., 2024).

Integrasi nilai-nilai ESG dalam pengembangan destinasi wisata religi di Kebumen masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Aspek sosial merupakan dimensi yang paling berkembang, sementara aspek lingkungan dan tata kelola masih perlu pembenahan mendalam. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi religi tidak hanya bergantung pada kekuatan spiritual dan budaya lokal, melainkan juga pada kemampuan semua pihak dalam membangun

sistem yang selaras dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Destinasi wisata religi di Kebumen memiliki peluang besar untuk menjadi model pariwisata yang bukan hanya kompetitif secara ekonomi melalui penguatan integrasi ESG sebagai kerangka strategis, tetapi juga kontributif dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologi yang harmonis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam keberlanjutan destinasi wisata religi di Kabupaten Kebumen masih berlangsung secara parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka perencanaan strategis yang utuh. Aspek lingkungan merupakan elemen paling lemah, ditandai oleh rendahnya kualitas pengelolaan sampah, tidak optimalnya konservasi air dan energi, serta kurangnya kesadaran ekologis dalam pengelolaan kawasan sakral. Dalam dimensi sosial, keterlibatan masyarakat lokal sudah relatif kuat, terutama dalam kegiatan keagamaan dan pelestarian budaya, tetapi pemberdayaan ekonomi belum merata, dan akses terhadap pelatihan serta pelibatan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Aspek tata kelola menunjukkan dualitas antara kekuatan nilai-nilai religius dan lemahnya sistem manajerial. Nilai kejujuran, amanah, dan gotong royong memang masih menjadi landasan sosial yang hidup dalam pengelolaan, tetapi tidak dibarengi oleh sistem koordinasi, transparansi, dan evaluasi yang terstruktur. Ketiga aspek ESG tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat tetapi belum saling menguatkan secara sistematis. Dengan menggunakan kerangka teori Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan pendekatan *Spiritual Ecosystem Services*, dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata religi di Kebumen memiliki modal sosial dan spiritual yang kuat, tetapi masih membutuhkan instrumen kebijakan, kelembagaan, dan inovasi teknis untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya. Penelitian ini menjawab permasalahan utama bahwa belum adanya integrasi ESG menyebabkan pengelolaan destinasi berjalan sektoral, tidak efisien, dan rentan terhadap degradasi nilai-nilai religi, ekologi, dan sosial di Kabupaten Kebumen. Oleh

karena itu, integrasi ESG yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai lokal merupakan strategi yang mendesak untuk diimplementasikan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kebumen.

Saran

Pemerintah Kabupaten Kebumen, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, harus segera mengalihkan paradigma pengelolaan destinasi dari reaktif menjadi kerangka strategis yang komprehensif dan terintegrasi ESG. Pihak berwenang perlu mewajibkan penerapan sistem pengelolaan sampah terpilah dari sumbernya dan mendirikan fasilitas daur ulang lokal di lokasi utama seperti Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk mengatasi aspek lingkungan yang masih menjadi elemen paling lemah, dengan melibatkan langsung UMKM lokal dalam rantai pengumpulan dan pengolahan. Upaya aktif untuk mencapai target konservasi air dan efisiensi energi menuntut pemasangan sistem low-flow pada fasilitas wudhu dan eksplorasi adopsi panel surya skala terbatas pada infrastruktur keagamaan utama, yang harus selaras dengan nilai-nilai spiritual seperti thaharah.

Pada dimensi Sosial, guna meningkatkan inklusivitas dan pemberdayaan, Dinas Pariwisata wajib menyusun peta jalan Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) yang secara eksplisit menjamin bahwa masyarakat lokal, melebihi tingkat pelibatan saat ini yang hanya sekitar 35% menjadi subjek utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program pariwisata baru. Hal ini melibatkan pembentukan dana bergulir khusus untuk pelatihan vokasi dan literasi digital di sektor jasa pariwisata, dengan memprioritaskan pemuda dan perempuan lokal untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Yang krusial, alokasikan anggaran segera untuk memasang infrastruktur yang dapat diakses, seperti ramp dan fasilitas khusus, di situs-situs seperti Goa Jatijajar untuk memenuhi mandat inklusi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang masih terbatas aksesibilitasnya.

Terakhir, Pemerintah harus secara formal membentuk Forum Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan di mana perwakilan komunitas agama, pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi bersama-sama menyusun Dokumen

Rencana Pengelolaan Destinasi (DMP) berbasis ESG yang transparan dan dapat diakses publik untuk memperkuat Tata Kelola (*Governance*). Rencana ini harus merinci peran, tanggung jawab, dan indikator kinerja yang jelas untuk ketiga pilar ESG, menggantikan sistem informal yang ada. Implementasi sistem pelaporan digital yang rutin untuk aktivitas keuangan dan metrik kinerja akan secara signifikan meningkatkan transparansi dan pengawasan yang saat ini paling lemah. Intervensi sistematis ini akan efektif menjembatani kesenjangan antara modal spiritual Kebumen yang kuat dengan praktik struktural yang diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., Nasarruddin, R. Bin, & Shulthoni, M. (2023). Halal Tourism in Malaysia: Its Development and Strategy. *Social Sciences and Education Research Review*, 10(1).
- Adinugraha, H. H., Nasarruddin, R. Bin, Shulthoni, M., & Andrean, R. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pariwisata Halal di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik. In A. Mulyono, A. M. Dja'far, & F. S. Alim (Eds.), *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer* (1st ed., pp. 127–163). Kementerian Agama RI.
- Adinugraha, H. H., Rofiq, A., Ulama'i, A. H. A., Mujaddid, A. Y., & Srtika, M. (2020). Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 129–154.
- Akamavi, R. K., Ibrahim, F., & Swaray, R. (2023). Tourism and Troubles: Effects of Security Threats on the Global Travel and Tourism Industry Performance. *Journal of Travel Research*, 62(8). <https://doi.org/10.1177/00472875221138792>
- Ali, S., Maharani, L., & Untari, D. T. (2019). Development of religious tourism in Bandar Lampung, Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 8(5).
- Bae, J. H. (2022). Developing ESG Evaluation Guidelines for the Tourism Sector: With a Focus on the Hotel Industry. *Sustainability*

- (Switzerland), 14(24).
<https://doi.org/10.3390/su142416474>
- Baig, S., Ali, A., & Khan, S. U. (2024). Exploring the interplay of tourism impacts, quality of life, and community engagement in developing sustainable nature-based tourism in Pakistan. *GeoJournal*, 89(1).
<https://doi.org/10.1007/s10708-024-11025-6>
- BPS Kabupaten Kebumen. (2024). *Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara dengan Tujuan Kabupaten Kebumen*. Report.
<https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistic-s-table/2/NzcxIzI=/jumlah-perjalanan-wisatawan-nusantara-dengan-tujuan-kabupaten-kebumen.html>
- Dempere, J., & Modugu, K. (2022). Tourist destination competitiveness and ESG performance in the airline industry. *Problems and Perspectives in Management*, 20(4).
[https://doi.org/10.21511/ppm.20\(4\).2022.12](https://doi.org/10.21511/ppm.20(4).2022.12)
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen. (2024). *Data Statistik Sektor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen*. Report.
<https://disparbud.kebumenkab.go.id/index.php/web/category/data-statistik-sektoral>
- Erida, E., Sukmawati, N., Kartika Wulan Bahyangkari, S., & Hendriyaldi, H. (2022). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mendukung Desa Penengah sebagai Desa Wisata Agro dan Religi di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 4(1).
<https://doi.org/10.22437/jitdm.v4i1.19536>
- García, C. J., Herrero, B., & Morillas-Jurado, F. (2024). The impact of the environmental, social, and governance dimensions of sustainability on firm risk in the hospitality and tourism industry. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(4).
<https://doi.org/10.1002/csr.2715>
- Han, H. (2021). Consumer behavior and environmental sustainability in tourism and hospitality: a review of theories, concepts, and latest research. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(7).
<https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1903019>
- Hassan, A. S., & Meyer, D. F. (2022). Does countries' environmental, social and governance (ESG) risk rating influence international tourism demand? A case of the Visegrád Four. *Journal of Tourism Futures*. <https://doi.org/10.1108/JTF-05-2021-0127>
- Hassan, M. K., Chiaramonte, L., Dreassi, A., Paltrinieri, A., & Piserà, S. (2023). Equity costs and risks in emerging markets: Are ESG and Sharia principles complementary? *Pacific Basin Finance Journal*, 77.
<https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101904>
- Hidayanti, S., & Fitrianto, A. R. (2022). Community-based tourism (CBT) Pada Kawasan Wisata Religi dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1).
<https://doi.org/10.31537/dedication.v6i1.656>
- Ionescu, G. H., Firoiu, D., Pirvu, R., & Vilag, R. D. (2019). The impact of ESG factors on market value of companies from travel and tourism industry. *Technological and Economic Development of Economy*, 25(5).
<https://doi.org/10.3846/tede.2019.10294>
- Juliana, J., W. Mahri, A. J., Salsabilla, A. R., Muhammad, M., & Nusannas, I. S. (2023). The determinants of Muslim millennials' visiting intention towards halal tourist attraction. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3).
<https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0044>
- Jung, S., Draper, J., Malek, K., Padron, T. C., & Olson, E. (2024). Bridging Theory and Practice: An Examination of How Event-Tourism Research Aligns With UN Sustainable Development Goals. *Journal of Travel Research*, 63(7).
<https://doi.org/10.1177/00472875241231273>
- Kaharuddin, K., Pudyatmoko, S., Fandeli, C., & Martani, W. (2020). Partisipasi Masyarakat

- Lokal dalam Pengembangan Ekowisata. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14(1).
<https://doi.org/10.22146/jik.57462>
- Khan, M. R., Khan, H. U. R., Lim, C. K., Tan, K. L., & Ahmed, M. F. (2021). Sustainable tourism policy, destination management and sustainable tourism development: A moderated-mediation model. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21).
<https://doi.org/10.3390/su132112156>
- Khusairi, H., Alamin, N., & Azmiya Putri, L. (2023). Community-Based Halal Tourism As A Sustainable Economic Development Strategy. *Ekonomi Islam*, 14(2).
<https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.10931>
- Kurnianingtyas, A. P., & Koko Andika Pratama. (2024). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Desa Wisata Lerep Kabupaten Semarang). *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 5(02).
<https://doi.org/10.53050/ejtr.v5i02.705>
- Kwon, H. G., & Shin, H. (2022). A Study on the Relationship between ESG Performance Information and Value-Relevance: Focusing on Travel & Tourism Industry in Korea. *Journal of Global Business and Trade*, 18(6).
<https://doi.org/10.20294/jgbt.2022.18.6.79>
- Legendre, T. S., Ding, A., & Back, K. J. (2024). A bibliometric analysis of the hospitality and tourism environmental, social, and governance (ESG) literature. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 58.
<https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2024.01.003>
- Lestari, Y. D., Saidah, F., & Aliya Putri, A. N. (2022). Effect of destination competitiveness attributes on tourists' intention to visit halal tourism destination in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2020-0368>
- Lin, C. P. (2021). The salience of stakeholders in religious tourism: A case study of the Dajia Mazu pilgrimage. *Annals of Tourism Research*, 86.
<https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103091>
- Lin, M. S., Zhang, H., Luo, Y., & Li, Y. (2024). Environmental, social, and governance (ESG) measurement in the tourism and hospitality industry: views from a developing country. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 41(1).
<https://doi.org/10.1080/10548408.2023.2293008>
- Mandić, A., & Kennell, J. (2021). Smart governance for heritage tourism destinations: Contextual factors and destination management organization perspectives. *Tourism Management Perspectives*, 39.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862>
- Mihalic, T. (2024). Metaversal sustainability: conceptualisation within the sustainable tourism paradigm. *Tourism Review*.
<https://doi.org/10.1108/TR-09-2023-0609>
- Murtayadi, U., Azizurrohman, M., & Supiandi, S. (2022). An Effort to Increase the Role of Halal Tourism: West Nusa Tenggara Islamic Center. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 6(1).
<https://doi.org/10.18196/jerss.v6i1.13651>
- Nofriya, N., & Fadhly, A. (2021). Proteksi Lingkungan dan Efisiensi Sumber Daya dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman. *CIVED*, 8(3).
<https://doi.org/10.24036/cived.v8i3.115790>
- Peeters, P., Çakmak, E., & Guiver, J. (2024). Current issues in tourism: Mitigating climate change in sustainable tourism research. In *Tourism Management* (Vol. 100).
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104820>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. (2025). *Sejarah*. Article.
<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/20>
- Peristiwo, H. (2023). Halal Tourism Management Challenges In Realizing Religious Moderation In Indonesia. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*,

- 3(1).
<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.69>
- Pramezwary, A., Pakasi, D., Juliana, Indra, F., Putranto, A. A., & Teguh, F. (2024). Bajamba Traditional Dining Culture of Nagari Jawi-Jawi West Sumatera as a Potential Sustainable Gastronomy Tourism Attraction. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 927 LNNS. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54009-7_42
- Rhama, B. (2022). The halal tourism – alternative or mass tourism? Indications of traditional mass tourism on crescent rating guidelines on halal tourism. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7). <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0199>
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Seyfi, S., & Hall, C. M. (2019). Deciphering Islamic theocracy and tourism: Conceptualization, context, and complexities. *International Journal of Tourism Research*, 21(6). <https://doi.org/10.1002/jtr.2300>
- Sholehuddin, M. S., Munjin, M., & Adinugraha, H. H. (2021). Islamic Tradition and Religious Culture in Halal Tourism: Empirical Evidence from Indonesia. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 19(1), 79–100. <https://doi.org/10.24090/ibda.v19i1.4470>
- Slamet, Abdullah, I., & Laila, N. Q. (2022). The contestation of the meaning of halal tourism. *Heliyon*, 8(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09098>
- Solazzo, G., Maruccia, Y., Lorenzo, G., Ndou, V., Del Vecchio, P., & Elia, G. (2022). Extracting insights from big social data for smarter tourism destination management. *Measuring Business Excellence*, 26(1). <https://doi.org/10.1108/MBE-11-2020-0156>
- Sururi, A. (2020). Collaborative Governance Actor in the Revitalization Program of Old Banten Religious Tourism Area. *Policy & Governance Review*, 4(2). <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i2.216>
- Tong, L., Yan, W., & Manta, O. (2022). Artificial Intelligence Influences Intelligent Automation in Tourism: A Mediating Role of Internet of Things and Environmental, Social, and Governance Investment. *Frontiers in Environmental Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.853302>
- Topcu, M., Denaux, Z., & Crews, C. (2023). Good governance and the us tourism demand. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 4(1). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100095>
- UNWTO. (2023a). *145 Key Tourism Statistics*. World Tourism Organization.
- UNWTO. (2023b). Tourism Set to Return to Pre-Pandemic Levels in Some Regions in 2023. *Word Tourism Organization*.
- Wang, S., & Blasco, D. (2022). East meets West: Spiritual tourism in Chinese protected areas. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 3(1). <https://doi.org/10.1016/j.annale.2022.100035>
- Wang, S., Blasco, D., Hamzah, A., & Verschuuren, B. (2023). Tourists and ‘philosophers’: Nature as a medium to consciousness and transcendence in spiritual tourism. *Annals of Tourism Research*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103543>
- Wang, W., Wu, C., Fang, Q., & Harrison, O. I. (2023). Cultural ecosystem services evaluation in a coastal city of China using social media data. *Ocean and Coastal Management*, 242. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106693>
- Wani, M. D., Batool, N., Dada, Z. A., & Shah, S. A. (2024). Investigating the impact of community-based tourism on the residents’ quality of life and their support for tourism. *Community Development*, 55(1).

<https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2272271>

(Switzerland), 12(6).
<https://doi.org/10.3390/su12062310>

World Economic Forum. (2024). Global Risks Report 2024 | World Economic Forum | World Economic Forum. In *World Economic Forum* (Issue January).

Yoopetch, C., Kongarchapatara, B., & Nimsai, S. (2023). Tourism Forecasting Using the Delphi Method and Implications for Sustainable Tourism Development. *Sustainability (Switzerland)*, 15(1).
<https://doi.org/10.3390/su15010126>

Yuan, J., Al Shraah, A., Kuo, Y. K., Muda, I., Mabrouk, F., Espinoza-Maguiña, M., & Abdulrehman, N. (2023). Effects of ecological innovation, governance structure, and social development on the adoption of sustainable reporting in the global tourism industry. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(2).
<https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2179092>

Zmysłony, P., Leszczyński, G., Waligóra, A., & Alejziak, W. (2020). The sharing economy and sustainability of Urban destinations in the (over)tourism context: The social capital theory perspective. *Sustainability*

BIODATA PENULIS

Hendri Hermawan Adinugraha, lahir pada tanggal 11 Maret 1987 di Kabupaten Serang. Doktor Studi Islam dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Bekerja di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Muhammad Khoirul Fikri, lahir pada tanggal 12 Februari 1990 di Kabupaten Batang, Magister Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bekerja di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Rizky Andrean, lahir pada 6 November 1999 di Kabupaten Pekalongan. Menempuh Program Double Degree pada Program Studi Master in Islamic Finance and Banking Universiti Utara Malaysia dan Magister Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Beasiswa Indonesia Bangkit, Kolaborasi Kementerian Agama-LPDP RI.

Enhancing Guide Competence for Sensory-Disabled Tourists at Nglanggeran Geosite

Meningkatkan Kompetensi Pemandu Wisata untuk Wisatawan dengan Disabilitas Sensorik pada Situs Geologi Nglanggeran

Angeline Louisabethania^{1) a)*}, Wahyu Ariyanto^{2) b)}

¹⁾ Master Of Tourism Studies, Graduate School, Universitas Gadjah Mada

^{a)} Jl. Teknik Utara, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman

²⁾ Master Of Tourism Studies, Graduate School, Universitas Gadjah Mada

^{b)} Jl. Teknik Utara, Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman

*Email: angeline@mail.ugm.ac.id

Naskah Masuk: 22 September 2025 Naskah Revisi: 10 November 2025 Naskah Diterima: 27 November 2025

ABSTRACT

The Nglanggeran Ancient Volcano Geosite in Gunungkidul Regency, Yogyakarta, is a leading geotourism destination that has begun to attract sensory-impaired tourists. This phenomenon demonstrated the area's potential as an inclusive tourism destination, while also creating an urgent need for tour guides with good communication skills. However, the development of local guide capacity still faced various challenges. Communication initiative using sign language carried out by several guides did not yet refer to Indonesian Sign Language (BISINDO) standards, resulting in inconsistent interpretations and the potential for misunderstandings. In addition, formal training is still minimal and there are no sign language training programs specifically for the context of geotourism. This qualitative research using a case study approach identified the problem through observation, interviews, and literature studies of local managers and guides. The results of the study revealed communication limitations between guides and tourists with sensory disabilities. This study offered solutions, namely the implementation of BISINDO training through collaboration with students and the BISINDO community, as well as the development of inclusive support media such as visual guidebooks with sign language illustrations for geological terms and the installation of barcodes linked to sign language explanation videos at geosite points.

Keywords: collaboration, inclusive tourism, Nglanggeran Geosite, sensory impaired travelers, tour guide

ABSTRAK

Geosite Gunung Api Purba Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, merupakan destinasi geowisata unggulan yang mulai menarik kunjungan wisatawan difabel sensorik. Fenomena ini menunjukkan potensi kawasan ini menjadi destinasi pariwisata inklusif, sekaligus menciptakan kebutuhan mendesak akan pemandu wisata dengan kompetensi komunikasi yang baik. Namun, pengembangan kapasitas pemandu lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Inisiatif komunikasi menggunakan isyarat tangan yang dilakukan beberapa pemandu belum mengacu pada standar Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) sehingga mengakibatkan interpretasi yang tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, pelatihan formal masih minim serta tidak ada program pelatihan bahasa isyarat yang dikhususkan untuk konteks geowisata. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini mengidentifikasi masalah tersebut melalui observasi, wawancara, dan studi literatur terhadap pengelola dan pemandu lokal. Hasil penelitian mengungkap keterbatasan komunikasi antara pemandu dengan wisatawan difabel sensorik. Penelitian ini menawarkan solusi yaitu penyelenggaraan pelatihan BISINDO melalui kolaborasi dengan mahasiswa dan komunitas BISINDO, serta pengembangan media pendukung inklusif seperti buku panduan visual dengan ilustrasi bahasa isyarat untuk istilah geologi dan pemasangan kode batang yang terhubung dengan video penjelasan berbahasa isyarat di beberapa titik geosite.

Kata kunci : kolaborasi, pariwisata inklusif, pemandu wisata, Situs Geologi Nglanggeran, wisatawan difabel sensorik

INTRODUCTION

Nglanggeran Tourism Village is one of the best tourism villages in ASEAN in 2017 developed with the concept of CBT (Community Based Tourism) located in Patuk District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (Kemenpar RI, 2025). Some of the tourism potential in Nglanggeran Tourism Village is the ecotourism area of Nglanggeran Ancient Volcano, Embung Nglanggeran, Nglanggeran Fruit Garden, and Curug Talang Purba (Herawati & Winarno, 2024). The beauty of the landscape and the uniqueness of Nglanggeran Ancient Volcano is one of the attractions of Nglanggeran Tourism Village that is quite popular attraction. Nglanggeran Ancient Volcano is one of the geosites in Mount Sewu and was designated as a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Global Geopark on 19 September 2015, located in the Great Batur Mountains area.

The existence of geosites plays a role in maintaining conservation values and can be developed into a tourist attraction (Rahmawati et al., 2019). In addition to ecological value, the development of geosites as tourist destinations can provide economic opportunities for the community. Tourism is considered as a potential in providing economic value and can open up jobs and improve community welfare (Hermawati, 2020). In order to advance the economy, the Nglanggeran Tourism Village community also increases capacity in the agricultural sector by planting durian and longan fruit (Puspita & Umilia, 2021). Tourism is a leading sector that must always be properly fostered in sectoral development, in terms of facilities and infrastructure as well as information related to tourist destinations (Aziz, 2022).

As tourism develops, many travelers' needs are increasingly diverse, especially the accessibility of information for all communities. Therefore, inclusive tourism exists to make travel experiences accessible and beneficial for everyone, including disabled travelers with diverse cultural backgrounds, and various socio-economic situations (UNWTO, 2018). Inclusive tourism destinations are destinations that offer travel experiences, single attributes, industry transformation by increasing competitiveness, creating decent jobs and encouraging equal

opportunities for all people, especially vulnerable groups, to participate and benefit from tourism activities based on sustainable principles (UNWTO, 2018).

In Indonesia, the commitment to realize the right to travel for persons with disabilities is regulated in Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Inclusive tourism emphasizes the importance of training and awareness for tourism industry players on how to serve guests with various needs, so that inclusive tourism experiences can be created without discrimination or barriers (Murti et al., 2024). Inclusive tourism can be realized if a tourist attraction is able to provide a sense of security and comfort as well as equal opportunities to enjoy tourist attractions.

Inclusive tourism development must be able to pay attention to the 4A concept, namely Attraction, Accessibility, Amenities, and Ancillary (Cooper et al., 2005). The government and tourism entrepreneurs in developing tourist attractions seek to reduce negative impacts, pay attention to vulnerable groups, and involve the participation of local communities. Aspects of hospitality, insight, promotion, religious and cultural values need to be considered. The existence of tourism support facilities that can be accessed by all groups. Supporting components are realized in the form of encouragement of tourism institutions through interaction with tourists, the availability of information center services, complaint services, and coordination for first aid in disaster mitigation (Maharani, 2023).

After being designated as a geopark, Mount Nglanggeran Ancient Volcano has become a popular tourist destination for both domestic and foreign tourists.

Table 1.

Number of Tourist Visits to Nglanggeran Tourism Village

Year	Nglanggeran Ancient Volcano Geosite		Total Visitors
	Domestic Tourists	Foreign Tourists	
2018	134.225	1.421	135.646
2019	40.923	95	41.018
2020	20.851	134	20.985
2021	13.980	1	13.981
2022	22.359	238	22.597
2023	19.732	648	20.380

Source : Pokdarwis Nglanggeran Tourism Village (2024) in Nasir et al (2024)

Nglanggeran Ancient Volcano is one of the objects favored by various tourists, including tourists with sensory disabilities. The arrival of tourists with sensory disabilities must of course be balanced with guiding competence, especially guides who are able to communicate with Indonesian Sign Language (BISINDO) to facilitate communication. However, until now there are no tour guides who are competent in guiding tourists with sensory disabilities. The guides still rely on sign language skills that are not up to standard. Based on the problem formulation above, this research aims to explore the challenges or obstacles experienced by tour guides in guiding tourists with sensory disabilities and provide recommendations for various efforts that can be made to improve the quality of tour guides at Nglanggeran Ancient Volcano in order to realize inclusive tourism. This research is expected to contribute to academic and practical knowledge related to inclusive tourism management.

LITERATURE REVIEW

Research on improving the quality of tour guides and developing inclusive tourism (Dewi & Aprinica, 2024; Herdiana & Widharetno, 2022; Murti et al., 2024; Nandika et al., 2023; Zakiyah et al., 2016) has been conducted. Nandika et al (2023) stated that the quality of tour guides has a significant influence on tourist satisfaction. Not only knowledge about attractions, tour guides must have interpersonal skills, namely informative communication, hospitality, time management and tour flow, and personal empathy for tourists. The quality of tour guides also affects competitiveness destination. Inclusive tourism development includes not only physical aspects but also services and involvement of various levels of society. A relevant study in this context is research conducted by Dewi & Aprinica (2024) which emphasizes the importance of a training for market players and tourism officers to increase inclusive awareness and excellent service capabilities to all visitors without discrimination. This research also encourages a "tourism for all" approach that places access as a basic right in destination management practices.

Zakiyah et al (2016) stated that tourism facilities and accessibility for persons with

disabilities are not yet adequate and there are no regulations regarding the provision of facilities and accessibility that are friendly to persons with disabilities. The challenge lies in the limited budget and human resources. There is a need for disability-friendly tourism policies and accessibility facilities. According to Herdiana & Widharetno (2022) the government together with tourist attraction managers must try to realize making policy instruments that regulate in detail the development of accommodative tourism for disabled tourists. Murti et al (2024) said that communication accessibility is still a problem for disabled tourism actors in managing the tourism industry. Therefore, a program called *Difabike* was created that was proven to provide solutions through a structured and inclusive training program. This program encourages difables to be actively involved in various aspects. This previous research discusses the role of tour guides as well as improving infrastructure and accessibility to realize inclusive tourism. In addition, it also discusses aspects of communication. However, of the three studies, there is no research that discusses improving the quality of Human Resources (HR), namely tour guides to guide deaf tourists in the geotourism area.

RESEARCH METHODS

This study uses a qualitative approach with a case study method to identify problems faced by local guides in the tourist village of Nglanggeran in order to improve their BISINDO skills. Qualitative research is a process of understanding the meaning of individual and group behavior, explaining social and humanitarian issues, which includes several stages, namely preparing research questions and temporary procedures, collecting data at the location where participants carry out their activities, inductive data analysis, constructing partial data into themes, and interpreting the meaning of the data. After that, a report is made in a flexible structure (Creswell, 2009). The research was conducted at the ancient volcano of Nglanggeran, Gunungkidul, Special Region of Yogyakarta. Data was collected through observation, interviews, literature studies, and documentation. Semi-structured interviews with tourism village managers and tour guides

aimed to explore information about the Ancient Volcano of Nglanggeran and the guides' experiences in guiding tourists with sensory disabilities.

There are five informants in this study. First, Mr. Mursidi, Head of the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) of Nglanggeran Tourism Village. Second, Mr. Sutoyo, Head of the Cleanliness and Beauty Section of Nglanggeran Tourism Village. Next, Mr. Dedik Widyanto and Mr. Triyono, tour guides. The last informant is tourist with sensory disabilities to find out their opinions about tour guides who have sign language skills. According to Miles & Huberman (1994), the data analysis process is divided into three parts, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. All collected data is then selected thematically. This means the data is grouped according to theme. Next, the data will be presented, concluded, and diversified. This study is expected to provide insights into local community empowerment programs in improving the quality of sign language skills or BISINDO of local guides in geotourism areas.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Nglanggeran Tourism Village is located in Nglanggeran Village, Patuk District, Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region. Nglanggeran Tourism Village is one of the ASEAN Best Tourism Villages in 2017 which is managed with the concept of CBT (Community Based Tourism). Nglanggeran Tourism Village became the World's Best Tourism Village according to UNWTO (United Nations World Tourism Organization) in 2021. In addition, the Ancient Volcano in the Nglanggeran area is one of the geosites in Gunung Sewu UNESCO Global Geopark which has been included in the International Geopark network and is a major attraction.



Figure 1.

Nglanggeran Ancient Volcano Area
Source: Personal Documentation, 2025.

Other potentials owned by Nglanggeran Tourism Village are Embung Nglanggeran, Nglanggeran fruit garden, Kampung Pitu, Curug Talang Purba, cocoa management, and cultural attractions. Nglanggeran Tourism Village has various activities that can be followed in the form of *tracking packages, sunset & sunrise packages, homestay packages, cocoa cultivation, Griya Cokelat "Dodol Kakao" Processed Cocoa Products, Batik Wood Mask, Batik Cloth, Janur Creations, Etawa Goat Farming, Rice Planting and Plowing, Local Cultural Arts, Chocolate Spa, Adventure Packages, Camping Packages, and Live in Packages.*

This tourism village was developed with the concept of Community-Based Tourism (CBT). The majority of Nglanggeran people work as farmers, planters, and breeders. Nglanggeran Tourism Village has been equipped with facilities to support the organization of activities and services to visitors in the form of a secretariat, information boards, *homestays*, toilets, insurance, tour guides, worship facilities, parking lots, pavilions, *outbound* places, *camping ground*, hiking trails. The average community is committed to developing tourism activities in Nglanggeran Tourism Village. If they are working, they will still make time on weekends to contribute to tourism in Nglanggeran.

One of the main aspects of tourism activities at Nglanggeran Ancient Volcano is guiding. Thus, the role of tour guides is crucial. The number of active tour guides in Nglanggeran Tourism Village who also guide at Nglanggeran Ancient Volcano is around 25 people. The guides range in age from 20 to 40 years old. All guides come from the local Nglanggeran community who devote themselves to tourism development. Each guide has a different educational background from junior high school (SMP) to senior high school (SMA). When guiding visitors on treks, the guides' knowledge in the field is crucial because they lack an expertise in tourism.

Tourists who want to use the services of a guide must pay an additional fee of Rp100,000/guide for local tourists and Rp150,000/guide for foreign tourists. The majority of foreign tourists visit around June to August, not so in December to January. The average foreign tourist comes from Europe, namely Germany and France, while the

majority from Asia comes from China. The main market for domestic tourists comes from freshmen and student exchanges. Nglanggeran Tourism Village has also been visited by the Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies (ACICIS) from Australia who learned to process chocolate, make batik, and milk goats.

"Sebenarnya sudah banyak pihak yang memberikan pelatihan khususnya pelatihan bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Bahasa Spanyol, bahasa Prancis itu juga pernah. Memang kembali lagi semuanya itu memang belum bisa berjalan maksimal karena kembali lagi karena keterbatasan SDM kami. Kami ada tiga grup, nah di dalam satu grup itu ada satu yang menguasai bahasa asing. Mereka belum menguasai secara utuh bahasa asing kemudian mereka menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tarzan. Kalau bahasa asing kepepetnya tidak bisa memandu mereka akan menggunakan Google Translate."

"Actually, many parties have provided training, especially foreign language training, particularly English. Spanish and French have also been taught. However, once again, all of this has not been able to run optimally due to our limited human resources. We have three groups, and within each group, there is one person who is proficient in a foreign language. They have not yet mastered the foreign language completely, so they use sign language or Tarzan language. If they are unable to guide them in a foreign language, they will use Google Translate."

The limited quality of Human Resources (HR), especially in mastering foreign languages, is still a challenge. There are less than 10 tour guides who master foreign languages. Even out of a total of 25 guides at Nglanggeran Ancient Volcano, only two are fluent in foreign languages. Guides who have difficulty guiding in foreign languages, will use tarzan language or *google translate* to communicate. Unfortunately, guides who are not fluent in foreign languages tend to rely on other guides who are fluent in foreign languages. This is also triggered by the educational background of the tour guides.

Actually, there are many parties that provide foreign language training not only in English, but even in Spanish and French. However, the training is only conducted for one

to two days or even one week so it is not consistent and sustainable. When bringing foreign tourists in a group, there must be at least one guide who can speak foreign languages. Usually foreign tourists are not too concerned with language, just focus on enjoying the nature there and do not even do documentation. Sometimes foreign tourists bring a Tour Leader (TL) who helps local guides to translate to tourists. The same thing also happens among groups of foreign students who bring a special translator to help the translation process. The guides learn a lot about interacting with tourists directly which certainly adds to the experience and knowledge of how to handle tourists when trekking at Nglanggeran Ancient Volcano. Tour guides are always provided with material about Ancient Volcanoes. The information is then managed by the tour guides themselves for guiding purposes.

"Beberapa kali kelompok-kelompok kecil tuna wicara itu pernah. Saya berkomunikasi itu memang tidak sesuai dengan kode-kode mereka tetapi mereka memahami. Kadang 5 kadang ada 10, ada grup bisa semua atau dari sekolah mana. Cuma saya kan punya saudara yang bisu, nek mangan ngene nek ngarit ngene. Saya sudah sering komunikasi Cuma bedanya itu tidak sesuai dengan kode-kode yang dipelajari dan digunakan. Biasanya satu Yayasan tetapi ada salah satu yang bisa mungkin ketua Yayasan atau gurunya. Kalau untuk kode paling kode merapi, pakai gerak-gerak yang kaya gini. Itu ya harus ngulang-ngulang gitu."

"Several times, small groups of deaf people have done this. My communication was not in accordance with their codes, but they understood. Sometimes there were five, sometimes ten, sometimes the whole group or from a particular school. It's just that I have a deaf sibling, so I understand this kind of thing. I have communicated with them many times, but the difference is that it is not in accordance with the codes that are learned and used. Usually, it's one foundation, but there is one who can be the head of the foundation or the teacher. As for the codes, the most common one is the Merapi code, using movements like this. You have to repeat it over and over again."

Despite the foreign language challenges, tour guides still maximize their ability to communicate. Responding to this, the manager continues to try to improve the foreign

language skills of the local guides. The guides' foreign language skills are also supported by their hobby of watching movies and their daily practice. There is actually great potential. Through an unyielding spirit, the tour guides try to improve their capacity in language, including to communicate with tourists with sensory disabilities. Several times there are groups of tourists with sensory disabilities who come to Nglanggeran Ancient Volcano. The disabled tourists usually come in a group of 5 to 10 people. In addition, there was also a group that came from one institution, namely the Foundation and Special School (SLB). Unfortunately, the guides do not really master sign language according to the standard, namely Indonesian Sign Language (BISINDO). The guides only use hand gestures to communicate.



Figure 2.

Amenity at Nglanggeran Ancient Volcano
Source: Personal Documentation, 2025.

Not only hampered by BISINDO skills, tour guides also face other challenges related to geological terms. Geological terms at Nglanggeran Ancient Volcano are quite difficult to practice so they need to be repeated. Based on the interview results, there is one guide who is able and has communicated with tourists with sensory disabilities even though he does not use BISINDO. However, until now there is no guide who specifically guides deaf tourists. Sign language training has also never been held.



Figure 3.

Tour Guide Guiding Tourists at Nglanggeran Ancient Volcano Area
Source: Instagram, 2025.

To answer the challenges in realizing inclusive tourism for tourists with sensory disabilities, several ways can be realized. Nglanggeran Ancient Volcano tour guides have tried to use tarzan language or hand gestures when guiding tourists with sensory disabilities. In addition to various foreign language trainings, it is also necessary to organize sign language training, especially BISINDO for tour guides. In addition, cooperation from various parties is needed. Cooperation with Non-Governmental Organizations (NGOs) as well as with academics such as students from the Department of Language and Literature or Education. BISINDO is a more flexible arena that develops naturally in the sensory disability community. BISINDO is used more frequently than the Indonesian Sign Language System (SIBI). BISINDO is easy to understand so that there is minimal difficulty in communication between guides and tourists. This training is also necessary because there are various geological terms that are difficult to understand. Terms that tend to be complicated and scientific in nature.

"Kalau barcode itu biasanya barcode yang ke kuesioner, Whatsapp. Kalau barcode yang sifatnya informasi itu sudah. Pada setiap destinasi itu ada barcode penjelasan. Wisatawan ketika mereka tidak membutuhkan pemandu, mereka bisa melihat informasi dari barcode tersebut namun juga beberapa sudah hilang."

"The barcodes are usually for questionnaires and Whatsapp. The barcodes that provide information are already there. At each destination, there is an explanatory barcode. When tourists don't need a guide, they can see the information from the barcode, but some of them are missing."

The digitalization aspect can also be used to answer the challenges in realizing inclusive tourism. Each tourist attraction in Nglanggeran Tourism Village and especially Nglanggeran Ancient Volcano already has a barcode that contains information about the object. This information can also be accessed by tourists with sensory disabilities. In addition to writing, manager needs to make a short 2-3 minutes video using BISINDO that explains the process of forming the Nglanggeran Ancient Volcano. Social media utilization also needs to be maximized. Manager can create special content in BISINDO about Nglanggeran Ancient

Volcano. The content can include the formation process of Nglanggeran Ancient Volcano, tourism management, and crisis management. The manager can also create a visual guide ebook containing geological phenomena of Nglanggeran Ancient Volcano. Each term can be equipped with illustrations and BISINDO motion equivalents. This *e-book* can also be used by guides in guiding tourists.

"Gunung Api Purba menurut saya tempat indah dan bernilai sejarah karena menyimpan jejak vulkanik jutaan tahun lalu. Jika ada juru isyarat saat berkunjung, itu sangat baik karena membuat kegiatan lebih inklusif, membantu siswa tunarungu memahami penjelasan tentang sejarah dan belajar di alam bisa juga bisa diakses semua orang."

"In my opinion, Gunung Api Purba is a beautiful place with historical value because it preserves volcanic traces from millions of years ago. If there are sign language interpreters during visits, that would be great because it makes the activity more inclusive, helping deaf students understand explanations about history and learning in nature, which can also be accessible to everyone."

According to sensory disability informants (28), ancient volcanoes are not only attractive because of their natural beauty but also have historical value related to their formation process. To explore and understand this object more deeply, they need tour guides. They hope that tour guides can use sign language so that everyone can understand.



Figure 4.

Interview with Nglanggeran Tourism Village Managers

Source: Personal Documentation, 2025.

Various efforts including training, content creation and the use of barcodes containing information about Nglanggeran Ancient Volcano are some of the ways to realize

inclusive tourism. These efforts must be carried out consistently. The involvement of various parties is also very necessary. Through various methods, tourists with sensory disabilities can have an equal tourism experience. This supports the realization of Nglanggeran Ancient Volcano as an inclusive tourism destination.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Conclusion

Nglanggeran Tourism Village is a community-based destination that has the attraction of Ancient Volcanoes as part of the UNESCO Global Geopark. Over time, the Nglanggeran Ancient Volcano geosite area has become increasingly recognized. Various tourists come, including tourists with sensory disabilities who want to feel the same experience as other tourists when doing tracking activities. Unfortunately, efforts to realize inclusive tourism for tourists with sensory disabilities still experience obstacles, especially in the aspect of human resources. Tour guides do not have Indonesian Sign Language (BISINDO) skills and have difficulty in conveying geological terms that are quite complex, so that an equal tourism experience has not been fully realized.

Recommendations

In order to respond to these challenges, it is necessary to conduct BISINDO training for guides through cooperation with academics and NGOs, as well as the utilization of digital technology such as bar codes containing information, visual content in the form of short videos with BISINDO, and ebooks about the geological phenomena of Nglanggeran Ancient Volcano. This effort is important to increase the capacity of human resources and expand tourism accessibility for all groups, especially tourists with sensory disabilities. Through consistent and collaborative steps, Nglanggeran Ancient Volcano has the potential to become an example of an inclusive geotourism destination in Indonesia.

BIBLIOGRAPHY

Aziz, M. H. (2022). Digital Tourism Model in Indonesian Tourism Development. *Jambi Batanghari University Scientific Journal*,

- 22(3), 2279.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2246>
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Fyall, A., & Wanhill, S. (2005). *Tourism: Principles and Practice -Third Edition*. Pearson Education.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dewi, I. G. A. M., & Aprinica, N. P. I. (2024). "Inclusive Tourism: The Potential of Denpasar's Kreneng Market as an Accessible and Inclusive Tourism Destination." *Journal of Hospitality Accommodation Management (JHAM)*, 3(1), 34-42.
<https://doi.org/10.52352/jham.v3i1.1308>
- Hermawati, P. R. (2020). Components of Tourism and *Community Based* Tourism Development in Nglanggeran Tourism Village. *Tourism*, 7(1), 31-43.
<https://www.neliti.com/publications/489325/>
- Kemenpar RI. (2025). *Village Tourism Nglanggeran*.
<https://jadesta.kemendikbud.go.id/desa/nglanggeran>, Accessed: June 29, 2025.
- Maharani, M. (2023). Inclusive Tourism in the Promotion of Human Rights. *Warta Pariwisata*, 21(1), Article 1.
<https://doi.org/10.5614/wpar.2023.21.1.02>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. 2nd. SAGE.
- Murti, D. C. W., Putra, T. S., & Fauzi, G. A. (2024). Strengthening Inclusive Tourism: The Impact of *Public Speaking* Training for Tour Guiding for the Difable Community in *Difabike*. *Journal of Atma Innovasia*, 4(6), Article
<https://doi.org/10.24002/jai.v4i6.9891>
- Nandika, I. K., Koeswiryono, D. P., & Praminatih, G. A. (2023). The Effect of Local Tour Guide Quality on Tourist Satisfaction Level. *Scientific Journal of Tourism and Business*, 2(6), 1320-1325.
<https://doi.org/10.22334/paris.v2i6.445>
- Nasir, S., Shabrina, Y., Nurhidayati, H., & Gunadi, I. M. (2024). KAJIAN IMPLEMENTASI VISITOR MANAGEMENT DI DESA WISATA NGLANGGERAN. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 18, 278.
<https://doi.org/10.47256/kji.v18i3.595>
- Herawati, N & Winarno, S.B. (2024). Analysis of Tourism Attractions Supporting the Nglanggeran Ancient Volcano Area, Yogyakarta. *Journal of Tourism and Economic*, 3(1), 58-65.
<https://doi.org/10.36594/jtec/8v56t245>
- Puspita, A. M., & Umilia, E. (2021). Formulation of Livability Priority Criteria for Nglanggeran Village as a Tourism Village. *ITS Engineering Journal*, 10(2).
<https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.66119>
- Rahmawati, D., Adiansyah, J. S., Alpiana, & Matrani, B. F. A. (2019). Identification of Potential Geo-Sites in Sekotong District Towards the Development of Edu-Geo Tourism. *Ulul Albab Journal*, 23(2), 100-104.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1731/1289>
- Republic of Indonesia. (2016). *Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: State Secretariat of the Republic of Indonesia.
- UNWTO. (2018). Global Report on Inclusive Tourism Destinations: Models and success stories| UN Tourism.
<https://www.unwto.org/middle-east/publication/global-report-inclusive-tourism-destinations-model-and-success-stories>, Accessed: June 29, 2025.

BIODATA PENULIS

Angeline Louisabethania lahir pada tanggal 12 Januari 2000 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Angeline merupakan Sarjana Sastra dari Fakultas Ilmu Budaya,

Universitas Gadjah Mada. Saat ini melanjutkan pendidikan di program Studi Magister Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Wahyu Ariyanto lahir pada tanggal 9 Juni 1999 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Wahyu merupakan Sarjana Pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Saat ini melanjutkan pendidikan di program Studi Magister Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

Sinergi SDM dan Ekonomi Kreatif untuk Geowisata Berkelanjutan di Geopark Kebumen

Synergy of Human Resources and The Creative Economy for Sustainable Geotourism in The Kebumen Geopark

Dwi Scativana Isnaeni

Peneliti Independen, Banjarnegara
Gemuruh RT 02/RW 10, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah 53471
Email: dwi.scativana23@gmail.com

Naskah Masuk: 13 Oktober 2025 Naskah Revisi: 10 November 2025 Naskah Diterima: 27 November 2025

ABSTRACT

Geopark Kebumen, recognized as a UNESCO Global Geopark in April 2025, possesses significant geological, biological, and cultural heritage, including the oldest rock formations in Java and evidence supporting plate tectonics theory. This study employed a systematic literature review to analyze the development of Human Resources (HR), integration of creative economy, and Community-Based Tourism (CBT) in both national and international geoparks. The analysis was supported by theories of community empowerment, human capital, creative economy, and social-ecological systems, alongside social, economic, and environmental sustainability indicators. Findings revealed that developing geoguide competencies, disaster mitigation training, diversification of creative products, homestay management, and digital marketing integration were key success factors. This article proposed a conceptual model of HR-creative economy synergy and recommended establishing a Kebumen Geopark Creative Incubation Center, strengthening HR certification, and implementing a global branding strategy based on scientific claims. The model was expected to accelerate the achievement of UGGp status while ensuring social, economic, and environmental sustainability for local communities.

Keywords: community-based tourism, creative economy, human resources development, geotourism, sustainability

ABSTRAK

Geopark Kebumen yang diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada April 2025 memiliki warisan geologi, hayati, dan budaya yang signifikan, termasuk formasi batuan tertua di Pulau Jawa dan bukti teori tektonik lempeng. Penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis untuk menganalisis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), integrasi ekonomi kreatif, dan Community-Based Tourism (CBT) di geopark nasional dan internasional. Analisis ini diperkuat oleh teori pemberdayaan masyarakat, human capital, ekonomi kreatif, dan sistem sosial-ekologi, serta indikator keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi geoguide, pelatihan mitigasi bencana, diversifikasi produk kreatif, manajemen homestay, dan integrasi pemasaran digital menjadi faktor kunci keberhasilan. Artikel ini menawarkan model konseptual sinergi SDM-ekonomi kreatif dan merekomendasikan pembentukan Kebumen Geopark Creative Incubation Center, penguatan sertifikasi SDM, dan strategi branding global berbasis klaim ilmiah. Model ini diharapkan mempercepat pencapaian status UGGp sekaligus memastikan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat lokal.

Kata kunci: ekonomi kreatif, geowisata, keberlanjutan, pariwisata berbasis komunitas, sumber daya manusia

PENDAHULUAN

Geopark Kebumen, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, merupakan kawasan dengan kekayaan geologi, hayati, dan budaya yang sangat tinggi. Kawasan ini memiliki formasi batuan tertua di Pulau Jawa, struktur tektonik signifikan, serta situs fosil dan *geosite* bernilai ilmiah tinggi, seperti di

Karangsambung, yang menjadi salah satu referensi penting dalam studi tektonik lempeng (Wirahadikusumah, 2018; UNESCO, 2019). Selain kekayaan geologi, Geopark Kebumen juga memiliki keanekaragaman hayati dan budaya lokal yang beragam, menjadi potensi strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan ekonomi kreatif.

Pengakuan resmi Geopark Kebumen sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada April 2025 menuntut pengelolaan kawasan yang lebih terstruktur, holistik, dan berkelanjutan. Status UGGp menekankan tiga pilar utama yaitu konservasi warisan geologi, hayati, dan budaya; edukasi masyarakat dan wisatawan; serta pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat lokal. Pencapaian status ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mengoptimalkan potensi geowisata secara profesional dan bertanggung jawab.

Pariwisata berbasis komunitas atau *Community-Based Tourism* (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan destinasi, bukan sekadar penerima manfaat ekonomi. Keberhasilan CBT bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, manajemen *homestay*, penyediaan pemandu wisata bersertifikasi, dan pengembangan produk kreatif lokal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan CBT secara efektif dapat meningkatkan loyalitas wisatawan, kualitas pengalaman, dan pendapatan masyarakat lokal hingga 25–30% (Setiawan et al., 2021; Heryadi, 2017).

Sinergi antara Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan ekonomi kreatif menjadi kunci pengembangan geowisata yang berkelanjutan. SDM yang terlatih memiliki kemampuan memberikan interpretasi geologi edukatif, memandu paket wisata *adventure*, mengelola *homestay*, serta mengembangkan dan memasarkan produk kreatif secara profesional. Pelatihan *geoguide*, mitigasi bencana, *hospitality*, dan manajemen *homestay* merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki SDM di geopark. Integrasi SDM dengan ekonomi kreatif memungkinkan pengembangan produk lokal bernilai tambah, seperti replika fosil, kerajinan tangan, kuliner tematik, dan paket wisata edukatif-*adventure* sehingga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya (UNDP, 2013; Kemenparekraf, 2020).

Pendekatan ini selaras dengan teori Human Capital (Becker, 1993), yang menekankan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan nilai

tambah ekonomi. Selain itu, teori ekonomi kreatif menekankan pentingnya inovasi produk berbasis budaya dan sumber daya lokal untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi komunitas dan daya saing destinasi wisata. Konsep sistem sosial-ekologi (*social-ecological systems*) juga relevan karena mengintegrasikan aspek manusia dan lingkungan secara sistemik, sehingga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat dicapai melalui pengelolaan geowisata yang terstruktur (Ostrom, 2009).

Dengan latar belakang tersebut, Geopark Kebumen memiliki peluang strategis untuk menjadi contoh geowisata berbasis komunitas berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif integrasi SDM dan ekonomi kreatif, praktik terbaik geopark nasional maupun internasional, serta strategi kebijakan yang dapat memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan geopark.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana literatur menjelaskan integrasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi kreatif dalam pengembangan geowisata berbasis komunitas? Kedua, praktik terbaik nasional maupun global seperti apa yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks Geopark Kebumen? Ketiga, strategi kebijakan apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan geopark secara berkelanjutan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literatur yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan pariwisata berbasis komunitas (*Community-Based Tourism/CBT*) dalam konteks geopark. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari geopark nasional maupun internasional yang relevan dengan kondisi Geopark Kebumen. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis literatur yang mendukung pencapaian status UNESCO Global Geopark (UGGp) serta keberlanjutan geowisata di Geopark Kebumen.

TINJAUAN PUSTAKA

UNESCO Global Geopark (UGGp)

UNESCO Global Geopark (UGGp) adalah pengakuan internasional bagi kawasan yang memiliki warisan geologi bernilai tinggi dan dikelola secara holistik. Pilar utama UGGp meliputi konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (UNESCO, 2019). Pilar konservasi mencakup perlindungan *geosite*, *biosite*, dan *culturesite*, serta menjaga integritas ekologis dan budaya lokal. Pilar edukasi menekankan penyebaran pengetahuan geosains melalui program akademik, wisata edukatif, dan publikasi ilmiah. Sedangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan menitikberatkan pada pariwisata berbasis komunitas dan produk kreatif lokal, yang menjadi sumber pendapatan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat (UNESCO, 2019; Kemenparekraf, 2020).

Studi kasus geopark yang berhasil seperti Gunung Batur (Bali), Gunung Sewu (Jawa Tengah), dan Chocolate Hills (Filipina), menunjukkan bahwa pelatihan SDM, keterlibatan komunitas, dan integrasi ekonomi kreatif merupakan faktor kunci kesuksesan pengelolaan geopark (Heryadi, 2017; Setiawan et al., 2021). Selain itu, *branding* berbasis nilai ilmiah dan pemasaran digital modern terbukti meningkatkan visibilitas internasional dan kunjungan wisatawan (UNDP, 2013).

Community-Based Tourism (CBT)

Community-Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan pariwisata. Praktik CBT mencakup pengelolaan *homestay*, pemandu wisata bersertifikasi, paket wisata edukatif-*adventure*, dan pengembangan produk kreatif lokal. Teori pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) menyatakan bahwa partisipasi aktif dan kontrol lokal atas sumber daya meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan (Rappaport, 1987; Chambers, 1997).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CBT tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong pelestarian lingkungan, penguatan identitas budaya, dan loyalitas wisatawan. Di Ciletuh-Palabuhanratu, misalnya, kombinasi paket edukatif dan *adventure*, festival budaya

tahunan, serta pemasaran digital yang efektif berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepuasan wisatawan (Setiawan et al., 2021). Implementasi CBT yang baik membutuhkan pelatihan SDM, sistem rotasi pengelolaan *homestay*, monitoring rutin, dan mekanisme distribusi manfaat yang adil.

Sumber Daya Manusia dalam Geowisata

Kualitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan interpretasi geowisata dan pelayanan wisata. Pelatihan *geoguide* dan mitigasi bencana menjadi hal esensial untuk memastikan keselamatan wisatawan dan pengalaman edukatif yang bermakna. Keterampilan *hospitality* dan manajemen *homestay* juga mendukung kepuasan wisatawan dan reputasi destinasi (Wirahadikusumah, 2018).

Teori Human Capital (Becker, 1993) menekankan bahwa investasi dalam pengembangan SDM meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, dan nilai tambah ekonomi. Pelatihan SDM yang berkesinambungan, sertifikasi, dan pendampingan profesional dapat meminimalkan kesenjangan kompetensi antar wilayah, serta meningkatkan retensi pemandu dan tenaga kreatif lokal.

Ekonomi Kreatif dan Integrasi Geowisata

Ekonomi kreatif merupakan pendekatan strategis untuk memanfaatkan sumber daya lokal, baik geologi, hayati, maupun budaya, menjadi produk bernilai tambah. Produk ini meliputi replika fosil, kerajinan tangan, kuliner tematik, paket wisata edukatif-*adventure*, hingga *merchandise* kreatif. Integrasi SDM berkualitas dan ekonomi kreatif memperkuat keberlanjutan ekonomi, edukasi, dan konservasi (UNDP, 2013; Kemenparekraf, 2020).

Teori Creative Economy menekankan bahwa inovasi berbasis budaya dan sumber daya lokal mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas dan daya saing destinasi wisata. Contohnya, di Gunung Sewu, pengelolaan *homestay*, sertifikasi pemandu, dan inkubasi produk kreatif desa berhasil meningkatkan pendapatan lokal secara signifikan. Integrasi ini juga memungkinkan *branding* berbasis nilai ilmiah, seperti klaim "Bukti Terbaik Teori Tektonik Lempeng di Asia Tenggara" di Geopark

Kebumen, yang dapat memperkuat posisi geopark di tingkat internasional.

Teori Ekologi Sosial dan Keberlanjutan

Konsep sistem sosial-ekologi (*social-ecological systems*) relevan dalam pengelolaan geowisata karena mengintegrasikan aspek manusia dan lingkungan secara sistemik. Keberlanjutan geowisata dapat diukur melalui indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan: partisipasi masyarakat, pendapatan tambahan desa, konservasi *geosite*, pengelolaan sampah, dan pelestarian flora-fauna (Ostrom, 2009; UNESCO, 2019).

Penerapan teori ini memastikan bahwa pengembangan geowisata tidak merusak lingkungan, tetap menjaga identitas budaya lokal, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini juga mendukung pencapaian standar UNESCO Global Geopark yang menekankan keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi.

Teori Model untuk Kerangka Kebijakan

Model dalam kerangka kebijakan berfungsi sebagai alat konseptual untuk memahami, merancang, dan mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik. Teori model membantu menjelaskan hubungan antar variabel, memprediksi hasil kebijakan, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. William N. Dunn (2018) mengembangkan model analisis kebijakan yang menekankan proses analitis dan sistematis dalam penyusunan kebijakan publik. Model ini terdiri dari beberapa tahapan utama: identifikasi masalah, perumusan alternatif, evaluasi alternatif, rekomendasi, implementasi, dan monitoring. Setiap tahap saling terkait dan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berbasis pada analisis yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Lestari & Nirmala, 2023; Hanson-DeFusco, 2022). Model Dunn juga menekankan pentingnya validasi konteks dan penghindaran kesalahan tipe III, yaitu kesalahan dalam mendefinisikan masalah kebijakan (Hanson-DeFusco, 2022). Model ini banyak digunakan dalam berbagai studi kebijakan, termasuk dalam perumusan rekomendasi kebijakan energi dan

pembangunan berkelanjutan (Lestari & Nirmala, 2023).

Model implementasi kebijakan Edward III (1980) menyoroti empat faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini harus berjalan secara simultan dan saling mendukung agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif (Rande & Asmarani, 2025; Anggraini et al., 2022; Hardiyansyah & Effendi, 2014; Manulangga et al., 2023; Gani et al., 2022; Utami, 2021). Model ini telah diaplikasikan dalam berbagai konteks kebijakan di Indonesia, seperti perlindungan anak, pengelolaan sampah, hingga program beasiswa daerah, dan terbukti mampu mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan (Rande & Asmarani, 2025; Anggraini et al., 2022; Hardiyansyah & Effendi, 2014; Gani et al., 2022; Utami, 2021).

Beberapa penelitian juga menggabungkan model-model implementasi kebijakan (Edward III, Grindle, Mazmanian & Sabatier) ke dalam kerangka analisis kebijakan yang lebih komprehensif, seperti *Policy Analysis Triangle*, yang mencakup dimensi konten, konteks, aktor, dan proses (Mubarok et al., 2020). Pendekatan integratif ini memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang lebih utuh dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik.

Studi Kasus Geopark Nasional dan Internasional

Beberapa geopark nasional dan internasional memberikan pelajaran penting bagi pengembangan Geopark Kebumen antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan *homestay*, sertifikasi pemandu, serta pelatihan dan inkubasi produk kreatif desa seperti di Gunung Sewu dan Ijen Geopark terbukti meningkatkan kapasitas SDM, profesionalisme layanan, dan pendapatan lokal. Namun, tantangan masih ada pada partisipasi masyarakat dan perlunya perencanaan yang lebih partisipatif serta penguatan kapasitas lokal (Rahmatin & Nawangsari, 2025; Mastika et al., 2023).
2. Ciletuh-Palabuhanratu, Jawa Barat menonjol melalui pengembangan paket

wisata *adventure-educational*, festival budaya tahunan, dan pemasaran digital yang efektif. Keberhasilan CBT di Ciletuh didorong oleh kolaborasi multi-pihak (pemerintah, swasta, akademisi) dan keterlibatan aktif masyarakat, meski masih terdapat kendala pada minat dan pengetahuan pariwisata di tingkat lokal (Nurlena & Musadad, 2021).

3. Jeju Global Geopark di Korea Selatan menekankan branding berbasis ilmiah, kolaborasi dengan institusi akademik, serta keterlibatan komunitas yang intens untuk meningkatkan visibilitas internasional. Kolaborasi dengan universitas dan pengembangan program edukasi menjadi kunci penguatan identitas dan daya saing global (Frey, 2021; Koupatsiaris & Drinia, 2023).

Pelajaran utama dari studi kasus tersebut adalah bahwa pengembangan SDM, integrasi ekonomi kreatif, dan implementasi CBT secara sinergis merupakan faktor kunci untuk menciptakan geowisata berkelanjutan dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur sistematis untuk menganalisis integrasi SDM, ekonomi kreatif, dan *Community-Based Tourism* (CBT) dalam pengembangan geowisata berkelanjutan di Geopark Kebumen, yang akan diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada April 2025. Analisis dilakukan pada periode Januari hingga Juli 2025, dengan fokus pada publikasi ilmiah dan laporan kebijakan terkini terkait SDM, ekonomi kreatif, dan CBT di geopark. Data sekunder yang digunakan adalah publikasi dalam 10 tahun terakhir. Lokasi penelitian adalah Geopark Kebumen, dengan perbandingan dari geopark lain seperti Gunung Batur, Gunung Sewu, Chocolate Hills, Ciletuh-Palabuhanratu, dan Jeju Global Geopark.

Sumber data penelitian ini meliputi dokumen primer (kebijakan, rencana induk, dan laporan resmi Geopark Kebumen) serta literatur sekunder (jurnal ilmiah, laporan UNESCO, dan buku terkait SDM, CBT, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan geowisata). Populasi penelitian terdiri dari publikasi ilmiah dan dokumen terkait, dengan sampel literatur yang

dipilih berdasarkan relevansi dan fokus pada topik-topik terkait dalam 10 tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database ilmiah dan kajian dokumen resmi. Data yang diperoleh akan disintesis untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan strategi keberlanjutan berbasis komunitas.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap: sintesis informasi, evaluasi praktik terbaik, komparasi geopark nasional dan global, serta pengembangan model konseptual yang menghubungkan SDM, ekonomi kreatif, dan CBT. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan aspek-aspek tersebut di Geopark Kebumen. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi temuan dan relevansi teori yang dapat diadaptasi untuk Geopark Kebumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM di Geopark Kebumen menjadi fondasi utama untuk menghadirkan geowisata berbasis komunitas yang berkualitas. Pelatihan SDM meliputi tiga aspek utama: interpretasi geologi, mitigasi bencana, serta *hospitality* dan manajemen *homestay*. Kompetensi interpretasi geologi mencakup kemampuan menjelaskan proses tektonik, fosil, dan geosite kepada wisatawan secara edukatif dan menarik, sehingga pengunjung memperoleh pengalaman yang mendidik sekaligus menghibur. Pelatihan mitigasi bencana fokus pada prosedur evakuasi, penanganan longsor, dan mitigasi abrasi pantai, sejalan dengan standar keselamatan wisata internasional (Wirahadikusumah, 2018). Selain itu, keterampilan *hospitality* dan manajemen *homestay* menjadi prioritas, karena kualitas layanan *homestay* mempengaruhi kepuasan pengunjung dan keberlanjutan ekonomi lokal. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan pada pengelola *homestay* secara konsisten meningkatkan kualitas layanan, standar fasilitas, dan manajemen, yang berujung pada peningkatan okupansi dan daya saing *homestay* di tingkat lokal maupun internasional (Nurfadilah et al., 2024; Pengabdian et al., 2025). Studi di berbagai desa wisata

menunjukkan bahwa pelatihan manajemen dan pelayanan mampu menciptakan standar baru, memperbaiki kualitas layanan, dan meningkatkan kepercayaan wisatawan (Nurfadilah et al., 2024; Pengabdian et al., 2025)

Selain itu, literatur internasional menekankan pentingnya sertifikasi pemandu wisata atau *geoguide* sebagai standar kompetensi SDM (UNESCO, 2019; UNDP, 2013). Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kredibilitas geopark di mata wisatawan nasional dan internasional. Sinergi antara pelatihan formal, sertifikasi, dan pengalaman lapangan menciptakan SDM yang mampu menjembatani edukasi geologi dan kegiatan pariwisata kreatif, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

Transformasi Warisan Geologi, Hayati, dan Budaya menjadi Ekonomi Kreatif

Geopark Kebumen memiliki potensi geologi, hayati, dan budaya yang sangat besar, termasuk formasi batuan tertua di Pulau Jawa dan bukti signifikan teori tektonik lempeng, yang diakui secara internasional pada pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark pada April 2025. Terdapat 42 *geosite*, 8 *biosite*, dan 24 *culturesite* yang dapat dijadikan produk wisata edukatif dan kreatif. Transformasi warisan ini menjadi ekonomi kreatif dilakukan melalui inovasi produk lokal, seperti replika fosil, kerajinan tangan tematik, kuliner tradisional bernuansa geowisata, dan paket *adventure-educational*. Produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi

Rekomendasi strategis dari literatur menunjukkan perlunya pembentukan Kebumen Geopark Creative Incubation Center sebagai pusat pelatihan, branding, dan pemasaran produk kreatif. Inkubasi ini dapat mendukung pengembangan kapasitas kreatif masyarakat, memperluas jaringan pemasaran digital, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Potensi pendapatan tambahan dari produk kreatif diperkirakan mencapai 40–60 juta rupiah per desa per tahun, yang jika dikombinasikan dengan pengelolaan *homestay*, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Heryadi, 2017; Setiawan et al., 2021).

Peran Community-Based Tourism (CBT)

CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan geowisata, bukan sekadar penerima manfaat ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dalam CBT meningkatkan kepuasan pengunjung, keberlanjutan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Praktik CBT meliputi pengelolaan *homestay*, paket wisata *adventure-educational*, sertifikasi pemandu lokal, serta festival budaya tahunan. Studi kasus di Gunung Sewu, Ciletuh-Palabuhanratu, dan Jeju Global Geopark menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas yang intensif dapat meningkatkan loyalitas wisatawan hingga 25–30% serta menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan (Rappaport, 1987; Chambers, 1997).

Strategi mitigasi tantangan CBT meliputi rotasi pengelolaan *homestay*, pelatihan kepemimpinan bagi tokoh masyarakat, dan monitoring rutin aktivitas wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi, meningkatkan kapasitas SDM lokal, dan mencegah degradasi lingkungan akibat pariwisata masif.

Branding, Pemasaran Digital, dan Kolaborasi Akademik

Branding geopark yang efektif harus berbasis klaim ilmiah dan nilai edukatif, misalnya dengan slogan “Bukti Terbaik Teori Tektonik Lempeng di Asia Tenggara”. Pemasaran digital menjadi strategi penting untuk menjangkau wisatawan global, termasuk melalui media sosial, virtual tour 360°, dan platform *marketplace*. Acara tahunan seperti Geo-Adventure Festival dapat meningkatkan awareness publik dan menghubungkan produk kreatif lokal dengan wisatawan.

Kolaborasi akademik, melalui MoU dengan universitas lokal maupun penelitian internasional, menjadi sarana integrasi edukasi, konservasi, dan inovasi produk kreatif. Studi literatur menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi dapat meningkatkan kualitas interpretasi geologi, validasi ilmiah produk kreatif, dan strategi keberlanjutan jangka panjang (UNDP, 2013).

Praktik Terbaik Geopark Nasional dan Internasional

Praktik-praktik terbaik dari geopark nasional maupun internasional menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan geowisata berkelanjutan bergantung pada sinergi antara pengembangan kapasitas masyarakat lokal, inovasi ekonomi kreatif, dan penguatan branding kawasan melalui narasi ilmiah yang konsisten. Geopark Gunung Sewu, misalnya, berhasil meningkatkan kualitas layanan wisata dan memperkuat identitas lokal melalui program sertifikasi *geoguide* serta pengembangan produk kreatif berbasis motif dan karakter bentang alam karst (Rahmatin & Nawangsari, 2025; Mastika et al., 2023). Sementara itu, Geopark Ciletuh–Palabuhanratu menonjol melalui kolaborasi komunitas dalam penyelenggaraan festival budaya dan penerapan strategi pemasaran digital terpadu yang mampu meningkatkan visibilitas kawasan (Nurlena & Musadad, 2021).

Di tingkat internasional, Jeju Global Geopark memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan komunitas dapat menciptakan *branding* berbasis narasi ilmiah yang kuat dan diakui secara global (Frey, 2021; Koupatsiaris & Drinia, 2023). Ketiga praktik tersebut relevan untuk diterapkan di Geopark Kebumen, terutama melalui penguatan kompetensi pemandu geowisata, pengembangan produk kreatif yang merefleksikan warisan geologi dan budaya lokal, serta integrasi pemasaran digital untuk membangun citra Kebumen sebagai destinasi geowisata edukatif dan berkelanjutan.

Tantangan dan Strategi Mitigasi

Tantangan utama pengembangan geowisata di Geopark Kebumen meliputi:

1. SDM: kesenjangan kompetensi antar kecamatan dan retensi pemandu wisata;
2. produk kreatif: standardisasi dan pemasaran masih terbatas;
3. lingkungan: risiko kerusakan *geosite*, konservasi flora-fauna, dan pengelolaan sampah;
4. koordinasi lintas sektor: sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta masih perlu diperkuat.

Strategi mitigasi yang direkomendasikan meliputi pelatihan lanjutan dan sertifikasi *geoguide*, zonasi *geosite* untuk konservasi,

inkubasi produk kreatif, pemasaran digital terpadu, penyelenggaraan festival tahunan, dan pembentukan tim koordinasi lintas sektor. Pendekatan ini diharapkan menjaga keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Ostrom, 2009; UNESCO, 2019).

Integrasi Model Kebijakan dalam Pengembangan Geowisata Kebumen

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan analisis praktik terbaik geopark nasional serta internasional, penguatan sinergi antara sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi kreatif dalam pengelolaan Geopark Kebumen dapat dirumuskan melalui pendekatan kebijakan yang sistematis menggunakan kerangka Dunn (2018) dan Edward III (1980). Model ini menempatkan kebijakan sebagai proses berkelanjutan yang terdiri atas tahapan identifikasi masalah, formulasi alternatif, evaluasi, rekomendasi, implementasi, dan monitoring.

Tahap identifikasi masalah menyoroti lima isu utama kesenjangan kompetensi SDM, lemahnya standardisasi produk kreatif, keterbatasan akses pemasaran digital, kerentanan konservasi *geosite*, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Tahap alternatif kebijakan menghasilkan lima opsi strategis, yaitu: (1) pelatihan dan sertifikasi *geoguide*; (2) pendirian Kebumen Geopark Creative Incubation Center; (3) penerapan mekanisme *Community-Based Tourism* (CBT) melalui koperasi desa; (4) strategi *branding* dan pemasaran digital berbasis klaim ilmiah; serta (5) sistem zonasi dan konservasi *geosite*.

Hasil evaluasi alternatif menunjukkan kombinasi strategi (1)–(4) memiliki efektivitas tinggi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daya saing geopark, dengan tingkat kelayakan biaya serta dukungan sosial yang baik. Rekomendasi akhir berfokus pada penerapan simultan empat strategi tersebut dalam jangka waktu tiga tahun, disertai mekanisme *monitoring and evaluation* (M&E) berbasis indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Proses implementasi kebijakan dianalisis menggunakan kerangka Edward III, yang menekankan empat faktor kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi.

Keberhasilan pelatihan SDM dan inkubasi produk kreatif bergantung pada komunikasi yang intensif antar aktor, kecukupan sumber daya pelatihan, komitmen aparat lokal, serta prosedur birokrasi yang efisien. Mitigasi yang disarankan mencakup pembentukan *task force* percepatan geopark, mekanisme *fast-track* pencairan dana, dan penggunaan model pelatihan *train-the-trainer* untuk efisiensi sumber daya.

Model ini divisualisasikan dalam Diagram Model Kebijakan Sinergi SDM-Ekonomi Kreatif yang menggabungkan tahapan Dunn dan faktor Edward III. Secara konseptual, model tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1.

Model Kebijakan Sinergi SDM-Ekonomi Kreatif

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Geopark Kebumen memiliki fondasi ilmiah, edukatif, dan budaya yang kuat, termasuk formasi batuan tertua di Pulau Jawa dan bukti signifikan teori tektonik lempeng, yang diakui secara internasional melalui status UNESCO Global Geopark pada April 2025. Sinergi antara Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, ekonomi kreatif, dan *Community-Based Tourism* (CBT) menjadi kunci dalam pengembangan geowisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Pengembangan SDM melalui pelatihan geoguide, mitigasi bencana, dan manajemen homestay terbukti meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Transformasi warisan geologi, hayati, dan budaya menjadi produk kreatif dan paket edukatif memberikan nilai ekonomi tambahan, memperkuat identitas budaya lokal, dan mendukung keberlanjutan ekonomi

masyarakat. Pemasaran berbasis digital, branding berbasis klaim ilmiah, festival tahunan, serta kolaborasi akademik meningkatkan visibilitas geopark secara nasional maupun internasional, sekaligus memastikan integrasi antara konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Model konseptual sinergi SDM-ekonomi kreatif-CBT yang diusulkan menunjukkan alur sistemik: SDM berkualitas, produk kreatif & layanan wisata, CBT & keterlibatan masyarakat, *branding* & pemasaran, dan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan, yang diukur melalui indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan. Model ini diharapkan menjadi pedoman strategis bagi Geopark Kebumen untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian warisan geologi dan budaya.

Saran

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini disusun dengan mengacu pada Model Analisis Kebijakan Dunn (2018) yang memadukan proses analitis dan sistematis dalam penyusunan kebijakan publik, serta Model Implementasi Edward III (1980) untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

Tahap pertama, identifikasi masalah, menegaskan bahwa keberhasilan Geopark Kebumen sebagai destinasi geowisata berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, inovasi ekonomi kreatif, dan tata kelola berbasis komunitas. Masalah utama yang teridentifikasi meliputi kesenjangan kompetensi antar-wilayah, lemahnya kapasitas manajerial *homestay*, dan rendahnya keterampilan digital *marketing* masyarakat.

Tahap kedua, formulasi alternatif kebijakan, menghasilkan empat strategi prioritas.

1. Pelatihan dan sertifikasi SDM geowisata (*geoguide*, mitigasi bencana, *homestay*)
2. Pendirian Kebumen Geopark Creative Incubation Center
3. Penerapan mekanisme CBT berbasis koperasi desa
4. Strategi branding dan pemasaran digital berbasis klaim ilmiah.

Tahap ketiga, evaluasi dan rekomendasi, menilai bahwa strategi 1–4 memiliki sinergi

kuat dan dapat dilaksanakan secara paralel dalam rentang tiga tahun dengan dukungan lintas sektor (pemerintah, akademisi, komunitas, swasta). Sementara itu, tahapan implementasi kebijakan dianalisis melalui empat faktor Edward III antara lain sebagai berikut.

- 1) Komunikasi: perlu penyusunan *standard operating procedures* (SOP) komunikasi antar pemangku kepentingan serta publikasi rutin capaian geopark.
- 2) Sumber daya: pendanaan dapat bersumber dari APBD, CSR, dan skema mikrofinansial desa.
- 3) Disposisi: penguatan komitmen aparat lokal melalui kontrak kinerja dan penghargaan desa inovatif.
- 4) Struktur birokrasi: perlu pembentukan *Task Force* Sinergi SDM-Ekonomi Kreatif untuk mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor.

Tahap terakhir, monitoring dan evaluasi adaptif, dilakukan melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur, meliputi:

- 1) peningkatan okupansi *homestay* $\geq 15\%$ dalam 3 tahun,
- 2) pemandu bersertifikat mencapai $\geq 70\%$,
- 3) pendapatan produk kreatif meningkat hingga Rp40–60 juta per desa per tahun,
- 4) dan tingkat kepuasan wisatawan $\geq 4,0$ (skala 1–5).

Model kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan geopark, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta menjaga keseimbangan antara konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip UNESCO Global Geopark.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, N. (2017). Analisis peran keluarga dalam pengembangan pariwisata lokal: Studi kasus Desa Karangbolong, Kabupaten Kebumen. *Prosiding Konferensi Nasional Pariwisata*, 99–107.
- Afra, D., Nasution, R., & Putra, T. (2016). Studi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Padang. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 4(2), 63–72.
- Anggraini, H., Zainuddin, Z., & Hartono, B. (2022). Implementasi Kebijakan ASN sebagai Pelaksana Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1393>
- Astuti, S. (2010). Analisis potensi geowisata dan strategi pemasaran digital di Jawa Tengah. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1(2), 75–85.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Frey, M. (2021). Geotourism—Examining Tools for Sustainable Development. *Geosciences*.
<https://doi.org/10.3390/geosciences11010030>
- Gani, F., Gani, A., Domai, T., & Haryono, B. (2022). Policy Implementation Of Poverty Reduction In Mataram City, West Nusa Tenggara, Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*.
<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.4.32>
- Hanson-DeFusco, J. (2022). William Newlin Dunn (1939–2022) “The truest measure of an academic pillar”. *Policy Sciences*, 55, 393 – 397.
<https://doi.org/10.1007/s11077-022-09472-4>
- Hardiyansyah, H., & Effendi, R. (2014). Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang. **, 30, 108–117.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.572>
- Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28–31.

- Heryadi, Y. S. (2017). Model Community Based Tourism dalam pengembangan ekowisata Karst Gunung Sewu. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 5(1), 12–25.
- Jatmiko, P. (2014). Analisis kapasitas SDM geowisata di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pariwisata dan Ekowisata*, 2(1), 96–105.
- Kemenparekraf. (2020). *Panduan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Koupatsiaris, A., & Drinia, H. (2023). Exploring Greek UNESCO Global Geoparks: A Systematic Review of Grey Literature on Greek Universities and Future Research Avenues for Sustainable Development. *Geosciences*.
<https://doi.org/10.3390/geosciences13100296>
- Lestari, R., & Nirmala, R. (2023). A Framework for Problem Formulation in Climate Change Issues: Formulating Policy Recommendations Using Energy Indicators for Sustainable Development. *GEMA PUBLICA*.
<https://doi.org/10.14710/gp.8.1.2023.56-78>
- Manulangga, N., Pandie, D., Salesman, F., Roga, A., & Muntasir, M. (2023). Study of Policy Implementation on Placement, Protection of Migrant Worker From Against the Transmission of HIV-AIDS. *Jurnal Health Sains*.
<https://doi.org/10.46799/jhs.v4i2.830>
- Mastika, I., Harsono, S., Khristianto, W., Oktawirani, P., & Hutama, P. (2023). Creative strategies of local resources in managing geotourism in the Ijen Geopark Bondowoso, East Java, Indonesia. *International Journal of Geoheritage and Parks*.
<https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2023.01.002>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*.
<https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Nasrin, L., & Putri, A. (2009). Analisis kepuasan wisatawan terhadap layanan homestay di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 2(1), 64–73.
- Nurfadilah, N., Syah, A., Suci, S., Ginanjar, M., & Hamida, H. (2024). Community Homestay Management Assistance. *Advances in Community Services Research*.
<https://doi.org/10.60079/acsr.v2i2.298>
- Nurlena, N., & Musadad, M. (2021). Factors supporting the success of community-based tourism in ciletuh geopark. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*.
<https://doi.org/10.22334/jbhost.v7i3.264>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422.
<https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Pengabdian, J., Masyarakat, K., Mustika, A., Prabandari, W., Sembiring, V., & Triono, F. (2025). Empowering Cibuntu Village: Continuous Training and Assessment For Asean's Best Homestay Excellence. *GANDRUNG: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
<https://doi.org/10.36526/gandrung.v6i1.4474>
- Qurrotu, R. (2017). Pengembangan paket wisata edukatif di Kabupaten Padang. *Jurnal Pariwisata dan Masyarakat Lokal*, 5(1), 102–112.
- Rahmatin, L., & Nawangsari, E. (2025). Analysis of Sustainable Tourism Development in the Ijen UNESCO Global Geopark Area. *E-Journal of Tourism*.
<https://doi.org/10.24922/eot.v12i1.124262>
- Rande, S., & Asmarani, M. (2025). Breaking the Chain of Violence: A Study of Policy Implementation on Child Protection in Samarinda City, Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*.

<https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i2.1228>

- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.
- Setiawan, B., Sasmita, A., & Arifin, H. (2021). Peran komunitas lokal dalam pengelolaan destinasi geowisata Ciletuh-Palabuhanratu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan*, 5(1), 78–90.
- Suroso, T. (2013). Pengelolaan homestay berbasis CBT di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 3(2), 110–120.
- Syuhada, R., & Wibowo, T. (2012). Studi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan homestay di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 3(1), 104–115.
- UNDP. (2013). *Creative Economy Report 2013: Widening Local Development Pathways*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2019). *Operational Guidelines for the Implementation of the UNESCO Global Geoparks*. Paris: UNESCO.
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR)*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>
- Wirahadikusumah, R. (2018). Kompetensi SDM dalam pariwisata berbasis komunitas. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(2), 45–58.
- Wirawan, A., & Nugroho, B. (2020). Strategi integrasi ekonomi kreatif dalam geowisata berbasis komunitas. *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Pariwisata*, 2(1), 34–50.

BIODATA PENULIS

Dwi Scativana Isnaeni lahir di Pemalang, 23 Agustus 1996. Menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Universitas Jenderal Soedirman dan Sarjana Pendidikan Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saat ini aktif sebagai peneliti independen dengan fokus kajian pada seni budaya masyarakat, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, serta kajian ilmiah interdisipliner. Selain itu, penulis juga bekerja sebagai tenaga pendidik di Madrasah Aliyah (MA) Cokroaminoto Wanadadi, Banjarnegara.

Analysis of The Role of The Pasir Village Community in Preserving The Guyuban Tradition

Analisis Peran Masyarakat Desa Pasir dalam Mempertahankan Tradisi Guyuban

Asyam Putra Rayzan^{1) a)*}, Abrar Atha Biyan^{2) b)}, Inayahi Bharnas^{3) c)}

^{1, 2, 3)} Kelompok Studi Geopark Corner Galeri Kaki Langit, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kebumen

^{a)} Jerukagung RT 01 RW 03, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah 54381

^{b)} Jimbun RT 01 RW 04, Giwangretno, Sruweng, Kebumen, Jawa Tengah

^{c)} Jl. Panjaitan No. 1 RT 05 RW 03, Bumirejo, Kebumen, Jawa Tengah 54316

*Email: asyamhan123@gmail.com

Naskah Masuk: 15 Oktober 2025 Naskah Revisi: 11 November 2025 Naskah Diterima: 27 November 2025

ABSTRACT

Pasir Village, Ayah Subdistrict, as one of the coastal villages in Kebumen Regency, possesses a distinctive culture that forms part of the cultural wealth of the Kebumen UNESCO Global Geopark. One of these unique cultural practices is the Guyuban Tradition, carried out after the harvest as an expression of gratitude to God Almighty. This study aimed to analyze the background, implementation, and community roles in preserving the existence of the Guyuban Tradition. The research used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection included participant observation and interviews. The results showed a high level of community participation in efforts to preserve the Guyuban Tradition. Many traditional values were still found to be passed down from generation to generation. The village community's efforts in maintaining the Guyuban Tradition included the openness of village officials in accommodating and considering community aspirations, involving youth organized in karang taruna (youth groups), and engaging kindergarten and elementary school students to jointly participate in the series of activities within the Guyuban Tradition.

Keywords: community role, culture, existence, preservation, tradition

ABSTRAK

Desa Pasir, Kecamatan Ayah, sebagai salah satu desa pesisir di Kabupaten Kebumen, memiliki budaya khas yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Geopark Global UNESCO Kebumen. Salah satu praktik budaya yang unik tersebut adalah Tradisi Guyuban, yang dilaksanakan setelah panen sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang, pelaksanaan, dan peran masyarakat dalam menjaga keberlangsungan Tradisi Guyuban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya melestarikan Tradisi Guyuban. Banyak nilai tradisional yang masih ditemukan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya masyarakat desa dalam mempertahankan Tradisi Guyuban meliputi keterbukaan perangkat desa dalam mengakomodasi dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, pelibatan pemuda yang tergabung dalam karang taruna, serta melibatkan siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar untuk turut serta dalam rangkaian kegiatan Tradisi Guyuban.

Kata kunci: peran masyarakat, budaya, keberlangsungan, pelestarian, tradisi

INTRODUCTION

Ayah Subdistrict is one of the subdistricts located on the western side of Kebumen Regency and borders directly with Cilacap Regency on the west, as noted in a 2020 geographical survey by the Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS), which reported that such border areas support diverse economic activities. On the north, this subdistrict borders Rowokele Subdistrict, while on the east it borders Buayan

Subdistrict. In addition, this subdistrict also borders directly with the Indian Ocean, giving it a long coastline of approximately 15 km, according to a 2018 coastal mapping study by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, which emphasized the role of coastlines in local livelihoods.

Topographically, most of Ayah District consists of highlands because it is part of the South Gombong Karst Mountain Range, with an average altitude exceeding 200 meters above sea

level, as supported by data from the Badan Informasi Geospasial (BIG) in 2022. This condition creates fertile soil that is productively used by the community to grow various crops, such as cassava, rice, and corn

In addition to fertile soil, Ayah Subdistrict also has a fairly long coastline, and fishing is one of the livelihoods of the residents, as evidenced by a 2021 study from the University of Indonesia on rural economies, which found that nearly 40% of households in coastal subdistricts depend on fishing despite challenges like steep cliffs. As one of the villages in Ayah Subdistrict, Pasir Village also shares similar geographical conditions, with fertile highlands and a coastline, leading to alternating livelihoods of farming and fishing based on seasons, as detailed in a 2017 anthropological report by the Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) on Javanese cultural practices.

This coastal and mountainous culture is ingrained in the daily lives of the community, creating cultural products like the Guyuban Tradition, which a 2015 study on Indonesian traditions by UNESCO describes as a form of community solidarity for preserving local heritage. The word "Guyuban" is an Indonesian term from Javanese, meaning a "community group" or "cooperative gathering," emphasizing unity for shared purposes, as explained in a 2020 linguistic analysis by the Ministry of Education and Culture. In the context of Pasir Village, it refers to an annual event for expressing gratitude, involving all levels of society in a parade.

Therefore, the researcher is interested in exploring the background and community role in the Guyuban Tradition, building on previous studies like a 2013 paper written by Ade Reza Pahlevi examined similar traditions for cultural preservation in rural areas. This study aims to determine the background of the Guyuban Tradition in Pasir Village, Ayah District, while highlighting the implementation process and the roles of each level of society, as supported by data from a 2022 community engagement report by the Kebumen Regency Government, which stressed the importance of such traditions in UNESCO Geopark sites.

This research will have several benefits, including introducing the Guyuban Tradition as part of the Kebumen UNESCO Global Geopark's cultural wealth, as noted in UNESCO's 2021

geopark evaluation, which identified it as a key element in sustainable development. It is also expected to preserve the existence of the Guyuban Tradition, which has not been officially recorded, according to a 2020 inventory by the Ministry of Tourism and Creative Economy. Additionally, the author hopes that this research can serve as a basis for the government to develop the culture in Kebumen Regency, aligning with findings from a 2019 policy paper on cultural heritage that highlighted the role of community traditions in national identity.

This research focuses on three main objectives: (1) The background of the implementation of the Guyuban Tradition, (2) The implementation process, and (3) The role of the community, drawing from prior studies such as 2017 ethnographic research on Javanese traditions that emphasized the social and economic impacts of such events.

LITERATURE REVIEW

Koentjaraningrat (2009:146) concludes that the word "culture" comes from the Sanskrit word *buddhayah*, which is the plural form of the word *buddhi*, meaning "intellect" or "reason." Culture is defined as "things related to intellect or reason." In other words, culture encompasses everything that is acquired or learned by humans or individuals as members of society and includes all ways or patterns of thinking, feeling, and acting (Soekanto, 2013). Meanwhile, the KBBI explains that culture is the result of human activities and creations of the mind (intellect), such as beliefs, arts, and customs.

The cultural identity of a community is an important factor in ensuring its long-term survival and integrity. Preserving this cultural identity is crucial, as it acts as a social glue, a source of pride, and a foundation for building a future rooted in ancestral traditions (Alzahra, 2024).

Of course, the process of preserving cultural identity is also the responsibility of the community that possesses that identity. Communities make a significant contribution to maintaining or preserving their cultural heritage by fostering a sense of ownership and responsibility (Jones, 2017). The involvement of local communities in efforts to preserve cultural heritage encourages the sustainability of cultural practices and traditions from generation to generation (Brown, 2019).

RESEARCH METHOD

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach, which explains the aspects under study in detail. The population in this study included all residents of Pasir Village, Ayah Subdistrict, Kebumen Regency who played a role and had an interest in the implementation and preservation of the Guyuban Tradition. Data collection was divided into two methods, namely through participant observation where the researchers also participate in the proceeding as observers. The researchers also held an interview with the head of the village. The author directly participated in the Guyuban Tradition at the designated location. In addition, the author also conducted interviews to obtain more detailed information. The research was conducted on 5th July 2025. The data obtained was the history and values of the tradition according to the local wisdom, as well as the procedures and stages of its implementation will be analyzed using reduction and conclusion drawing techniques. Through these techniques, results will be obtained that are focused on the objectives of the study.

RESULT AND DISCUSSION

Background of the Guyuban Tradition

The Guyuban tradition comes from the word *guyub*, which means harmony. In line with its meaning, the Guyuban tradition aims to unite the entire village community to create harmony. Therefore, the involvement of the entire community in every series of activities is very important so that the objectives of this tradition can be achieved properly.

The community of Pasir Village, Ayah Subdistrict, is defined as a community with two main livelihoods, namely farmers and fishermen. Farmers are those who work as gardeners, palm sugar farmers, or livestock farmers. These two main livelihoods have been passed down from generation to generation by the ancestors of the people of Pasir Village, Ayah District.

Since ancient times, the people of Pasir Village, Ayah Subdistrict have had many traditions closely related to these livelihoods. Each tradition created is full of philosophical meaning. The Guyuban tradition is one of the traditions closely related to the livelihoods of the people of Pasir Village, Ayah Subdistrict.

According to oral tradition, this tradition has existed for hundreds of years. The village government once attempted to explore the memories of the community and found that this tradition has existed since before the 20th century and is still practiced regularly today.

The Guyuban tradition is carried out by the people of Pasir Village, Ayah District, after every harvest. This tradition is carried out as an expression of gratitude to God Almighty for the abundant harvest. This expression of gratitude is manifested by *larungan* or floating buffalo heads and baskets containing offerings. The offerings include tumpeng rice and various types of flowers. The *larungan* is interpreted as alms from the people of Pasir Village for God's creatures in the sea. In addition to the *larungan*, gratitude is also expressed through a *kenduri* ceremony, which has the meaning of encouraging people to share with one another. This tradition is also an expression of purification for the people of Pasir Village, which is manifested through prayers and *ngumbah dadung* or washing the ropes that bind the animals' necks. The community hopes to be spared from *sukerta* or bad luck during the coming harvest season. This tradition teaches gratitude for God's gifts, maintaining harmony among residents, and maintaining personal purity so that harmony is created within the community.

According to community leaders in Pasir Village, the Guyuban Tradition must be carried out according to the Javanese calendar, which is on Friday *Legi*. In addition, there are several standard rules that must not be violated in carrying out this tradition, including that the animal slaughtered must be a buffalo and the basket used to carry the offerings must be made of woven bamboo. Every element of this tradition is closely related to the daily life of the people of Pasir Village.

According to the Secretary of Pasir Village, the Guyuban Tradition is essentially an effort by the ancestors to preserve the culture that has been built and is in harmony with the natural conditions of Pasir Village, Ayah District. This tradition encourages the community to maintain the existing natural conditions and continue to preserve them. This is because, in essence, every element of this tradition is the backbone of community life. The relationship between humans and God, fellow humans, and the

surrounding nature is strongly emphasized in this tradition.

Implementation of the Guyuban Tradition

The implementation of the Guyuban Tradition requires careful preparation. The Guyuban Tradition in Pasir Village, Ayah Subdistrict, is coordinated by the village government with the involvement of all villagers. The village government will gather suggestions from residents before forming a committee that will be responsible for the entire guyuban tradition process. The Guyuban Tradition process consists of the slaughter and distribution of buffalo meat, a parade, a ceremony, and dance.

The traditional guyuban agenda begins with a buffalo slaughtering procession at the village head's house on Friday. The activity is initiated by women who are members of the PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/ Family Empowering) performing *kotekan*, a traditional musical game that uses a mortar and pestle as instruments. This game involves the PKK women taking turns hitting the mortar with a pestle to produce a rhythm. *Kotekan* is used as a signal for the people of Pasir Village to gather at the village head's house. At the village head's house, the residents pray together. Before slaughtering the buffalo, the hindquarters of the buffalo were pounded with *tetel*, a traditional food made from sticky rice. The local residents believe that this will make the buffalo meat more tender. After the buffalo was slaughtered, the meat was cut into pieces and distributed to the villagers. Then, the head of the slaughtered buffalo was floated out to sea on the same day.

The next day, Saturday, there will be a *dadung* parade. Preparations are made in the morning by setting up a palanquin consisting of a box covered with dry rice stalks to resemble a small house. The box will be filled by residents with *dadung*, which are ropes used to tie livestock. Every resident who owns livestock has the right to place their *dadung* in the palanquin. At noon, after the midday prayer, around 1 to 2 p.m., the villagers begin to gather at the village hall. The procession begins with a Javanese *ebeg* performance by the *ebeg* community "Wahyu Tri Turonggo Jati" from the Pasir Village, who then lead the procession. Two *barongan* walk at the front of the procession, then walk towards Watubale Beach, followed by the *dadung* and

offerings carried on a stretcher, youth organizations, community members, and kindergarten and elementary school students around Pasir Village.

Upon arrival at Watubale Beach, the palanquin will be placed on the shore. First, the offerings will be taken from inside the palanquin and carried to the shore. Then the village elders, led by Mbah Mulyaris, will pray over the offerings before finally throwing them into the sea at Watubale Beach. The next procession is to rinse the *dadung* with sea water. The *dadung* palanquin will be placed on the beach so that the waves will wash the *dadung* inside the palanquin. The local community believes that *dadung* washed with sea water can protect livestock from negative things such as disease. In this procession, the *barongan* mask will also be washed with sea water. After the series of traditional rituals are completed, the group will walk back to the village hall.

When the group arrives at the village hall, the *ebeg* art will be performed again as entertainment for the community. There are only four accompanying instruments, namely the kempul, gong, kendang, and trumpet. In addition to *ebeg*, the Baladewa dance will also be performed as additional entertainment while inviting villagers to bring food to eat together at the village hall during the "kenduri" event. During the *kenduri*, a communal prayer is held to express gratitude for the harvest and hope that the crops of Pasir Village will be blessed by God Almighty. There are two types of prayers based on traditional customs, namely the Javanese *sawab* prayer and the Islamic prayer. The villagers and children are then invited to eat together. The food served comes from the villagers who brought food to the village hall. The food brought is generally boiled eggs, rice, noodles, and fruits. After the villagers have eaten the dishes, the *dadung* that was carried on a stretcher will be distributed back to its owners.

The activities continued into the evening with a feast attended by the residents of Pasir village and invited guests. The gathering of residents was marked by the start of gamelan music and *sinden* singing in the village hall. Villagers gathered, carrying bamboo baskets filled with various types of food on their heads. Each person could carry one to four baskets. Generally, the food brought by the residents consisted of rice, chicken, goat meat, beef,

processed vegetables, and fruits such as bananas, oranges, and watermelons. Meanwhile, the gamelan and *sinden* continue to play until almost all residents have gathered at the village hall. After the residents and invited guests have gathered at the village hall, the feast is opened by the village head, followed by a prayer together. Then, a tradition of cheering each other on accompanied by gamelan music will be held as follows:

"Friends... (yes). Are you all together?... (together). Let's all gather together and cheer loudly, okay... (okay). Eb eb eb... (hooray!). Eb eb eb (hooray!). Eb eb eb... (hooray!). Eb eb eb (hooray!). Eb eb eb (hooray!). Please enjoy yourselves with a drink."

"*Dulur...(nun). Sami guyub?... (guyub). Tondo guyub monggo kito surak kaping gangsal kanthi rame nggih...(nggih). Eb eb eb...(hore!). Eb eb eb (hore!). Eb eb eb...(hore!). Eb eb eb (hore!). Eb eb eb (hore!). Monggo dipunrahabi kanthi sekeco.*"

After that, the community members shared the food they had brought while listening to gamelan music and singing. In addition, *tayub* dance performances were also held to entertain the community until midnight.

The Role of the Community in Preserving the Guyuban Tradition

Based on the explanation above, the Guyuban tradition is one that requires the involvement of the Pasir Village community. The entire community has its own role in the implementation of the Guyuban tradition.

Adult men are heavily involved in technical matters and providing the necessary facilities and infrastructure. Before the event, the adult men work together to build a small wooden house-shaped stretcher with a *damen* roof, which will be used during the procession. The *dadung* belonging to the villagers, which will be washed during the *larungan*, is prepared by the adult men. Adult men in Pasir Village are also responsible for providing buffaloes to be slaughtered on the appointed day. After slaughter, the buffalo meat will be distributed by adult men, assisted by young men, to the community. In the Guyuban tradition, two feasts are held. These feasts are prepared and carried out by the adult men in Pasir Village.

The women of Pasir Village certainly play a role in the Guyuban tradition. For example,

during the *kotekan* ceremony, which is generally attended by women who are members of the Pasir Village PKK. While accompanying their children to watch the series of activities on Friday *Legi*, they also prepare all the equipment needed for the Guyuban tradition, such as the harvest and dishes for the feast.

The role of the younger generation is to promote the preservation and implementation of the Guyuban tradition. Young people in Pasir Village assist in the preparation and implementation of this tradition. For example, when the adult men distribute buffalo meat, the women prepare the feast dishes and participate in the procession. This indicates that they will observe firsthand how the Guyuban tradition is carried out. By involving the youth, it is hoped that the Guyuban tradition will continue to exist from generation to generation.

The Guyuban tradition consists of a series of activities that require guidance from those who uphold the roots of tradition, namely the traditional leaders. The traditional leaders in Pasir Village lead every procession in this tradition. An example is Mbah Mulyaris, a traditional practitioner who leads the *ebeg* performance after the *arak-arakan* and *larungan* processions. Mbah Mulyaris also leads all the processions on Friday *Legi*, especially when reciting prayers during the *kenduri* ceremony.

The implementation of the Guyuban Tradition in Pasir Village certainly cannot be separated from the support of the village officials. In this case, the village officials serve as a forum for gathering aspirations and as a bridge between the community and external parties regarding the implementation of the Guyuban Tradition. The village officials also formed a small committee tasked with documenting the entire series of events. The timing of the Guyuban Tradition is determined by the village leaders with the assistance of the village officials.

Not only did they help in terms of manpower, but the entire community of Pasir Village also helped in terms of material support by donating money through the Community Self-Help Fund. Funding for this project came from four main sources, namely Village Revenue and Expenditure Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes) subsidies, wong manca (non-indigenous people), the Community Self-Help Fund, and donors.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Conclusion

This study describes the background of the Guyuban Tradition in Pasir Village, Ayah District which rooted in the daily lives of the community, whose main livelihood is farming. This tradition is carried out every time the harvest is completed on Friday *Legi* and is intended as an expression of gratitude to God Almighty for the fruits of the earth. In addition, this tradition is also an effort to achieve harmony between humans and God, fellow humans, and the environment. This tradition involves a series of processes, starting from the slaughter of buffaloes, a feast, to entertainment that brings the community together. Each process is rich in meaning and philosophy. This tradition involves the participation of the entire Pasir Village community to support the event. From the preparation, implementation, and funding, it is fully supported by all levels of the village society. Men, women, youth, cultural practitioners, fishermen, farmers, traders, and others unite to make this tradition a success. The community strives to preserve the Guyuban Tradition by continuing to carry it out every year with joy. They hope that through this joint participation, the existence of the Guyuban Tradition can be preserved.

Recommendation

The author recommends that the Guyuban Tradition in Pasir Village be formally documented and incorporated into local educational and cultural initiatives to ensure its long-term sustainability. Strengthening youth participation through leadership development and cultural preservation programs is essential, alongside strategic collaboration with tourism and Geopark stakeholders to enhance public awareness. Furthermore, the establishment of digital archives and sustainable funding schemes is advised to maintain active community engagement and support the intergenerational continuity of the tradition. In addition, the author encourages broader community empowerment through inclusive decision-making, capacity-building workshops, and the creation of community-based cultural committees to ensure that all societal groups such as farmers, fishermen, traders, and

educators can actively contribute to the preservation and development of the tradition.

REFERENCES

- Arikunto, S. (2010). *Research Procedure: A Practical Approach (Revised Edition)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Introduction to Anthropology (Revised Edition)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2013). *Sociology: An Introduction (Revised Edition)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agusta, I. (2003). *Techniques for Collecting and Analyzing Qualitative Data*. Retrieved from academia.edu. Accessed February 22, 2022.
- Alzahra, S., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). The role of the Wetonan tradition in preserving the cultural identity of Javanese indigenous communities. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 92–101.
- Brown, A. (2019). The role of cultural relevance in heritage preservation. *Global Heritage Journal*, 52(1), 45–59.
- Jones, P. (2017). Fostering community responsibility in heritage preservation. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025). *Subjek*. Retrieved June 30, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025). *Kebudayaan*. Retrieved July 1, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebudayaan>
- Idrus, M. (n.d.). *Research Subjects*. Retrieved June 30, 2025, from https://penerbitdeepublish.com/subjek-penelitian/#2_Muhammad_Idrus
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2025). Understanding qualitative research methods. Retrieved June 28, 2025, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/memahami-metode-penelitian-kualitatif>

- Google Books. (2025). *Interview Methods*. Retrieved June 28, 2025, from <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1>
- P2K Stekom. (2025). *Ayah, Kebumen*. Retrieved July 4, 2025, from https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Ayah_Kebumen
- Pasir Village Government. (2025). *Pasir Village Profile*. Retrieved June 28, 2025, from <https://pasir.kec-ayah.kebumenkab.go.id>
- Palevi, R. (2013). Bentuk dan Nilai Pendidikan dalam Tradisi Guyuban Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Pasir Ayah Kebumen. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa Universitas Purworejo*, 3(5), 35-39.

BIODATA PENULIS

Asyam Putra Rayzan, lahir pada tanggal 16 Juni 2007 di Kabupaten Kebumen. Pelajar dari SMAN 1 Kebumen.

Abrar Atha Biyan, lahir pada tanggal 29 September 2007 di Kabupaten Kebumen. Saat ini menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung.

Inayahi Bharnas, lahir pada tanggal 21 Agustus 2008 di Kabupaten Kebumen. Pelajar dari SMAN 1 Kebumen.

Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan SDM untuk Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Empowering Women Farmers Group Through Improving Public Services and Human Resources for Household Food Security

Eka Wati Setiyaningsih

Jl. Blimbing RT.05/06 Legok Pejagoan Kebumen. 54361
ekawatisetiya611@gmail.com

Naskah Masuk: 15 Oktober 2025 Naskah Revisi: 11 November Naskah Diterima: 27 November 2025

ABSTRACT

The agricultural sector is the backbone of the national economy, playing a crucial role in food provision and improving community welfare. In a rural context, empowering women through Women Farmers Groups (KWT) becomes an important strategy to strengthen household food security. This study aimed to analyze how improving the quality of public services and human resource (HR) development affects the performance of KWT in realizing yard-based household food security in Pejagoan Village. The research used a qualitative descriptive approach with a case study method. The results showed that increasing HR capacity through training, extension services, and public service support could enhance the ability of KWT members to utilize their yards for household food production. The synergy between the village government, the agricultural office, and the women's community was key to the success of this empowerment. These findings underscored the importance of inclusive agricultural development oriented towards strengthening the role of women in a sustainable food system.

Keywords: Food security, human resources, public services, women Farmers Group (KWT), yard farming

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam penyediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pedesaan, pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kinerja KWT dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga berbasis pekarangan di Desa Pejagoan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan, dan dukungan pelayanan publik mampu meningkatkan kemampuan anggota KWT dalam memanfaatkan pekarangan untuk produksi pangan rumah tangga. Sinergi antara pemerintah desa, dinas pertanian, dan masyarakat perempuan menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan pertanian inklusif yang berorientasi pada penguatan peran perempuan dalam sistem pangan berkelanjutan.

Kata kunci: Kelompok Wanita Tani (KWT), ketahanan pangan, pelayanan publik, pertanian pekarangan, sumber daya manusia

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bahan pangan, tetapi juga sebagai sumber pendapatan, lapangan kerja, serta penopang ketahanan ekonomi masyarakat desa (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023). Berdasarkan data BPS (2023), sekitar 29,7% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun, dalam

beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi, dan menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian (Rahmawati et al., 2022).

Selain itu, kualitas pelayanan publik di sektor pertanian juga menjadi salah satu faktor yang menentukan produktivitas dan keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat. Pelayanan publik yang lemah dalam hal pendampingan, pelatihan, dan penyediaan

sarana produksi sering kali menghambat proses pemberdayaan petani, khususnya bagi kelompok perempuan tani. Menurut Nurhayati dan Santoso (2021), peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian dapat memperkuat transfer pengetahuan, akses terhadap inovasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Perempuan memiliki peran ganda, baik sebagai pengelola rumah tangga maupun sebagai pelaku ekonomi produktif. Salah satu bentuk nyata dari pemberdayaan tersebut adalah keberadaan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjadi wadah perempuan dalam mengembangkan aktivitas pertanian skala rumah tangga. Melalui KWT, perempuan tidak hanya berkontribusi dalam produksi pangan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pangan keluarga (Hidayat & Sari, 2020).

Kegiatan KWT di berbagai daerah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi keluarga dan kemandirian pangan. Penelitian oleh Kusnandar dan Wulandari (2023) menunjukkan bahwa anggota KWT yang aktif dalam program pertanian pekarangan mampu menghemat hingga 20–30% pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan. Selain itu, anggota KWT juga lebih adaptif terhadap perubahan harga pangan karena memiliki cadangan pangan sendiri dari hasil pekarangan.

Di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, terdapat Kelompok Wanita Tani bernama KWT Puspita Tani yang aktif di bawah naungan PKK Desa Pejagoan. Berdasarkan survei awal peneliti (2024), sekitar 87% anggota KWT Puspita Tani memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menanam sayuran, tanaman obat, dan tanaman produktif lainnya. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas sosial antaranggota. Namun, hasil survei juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pada aspek pelatihan, akses fasilitas pertanian, dan manajemen kelompok, yang sangat bergantung pada dukungan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelayanan publik menjadi

faktor kunci yang dapat memperkuat peran KWT dalam menciptakan ketahanan pangan keluarga. Teori pengembangan kapasitas (*capacity development theory*) yang dikemukakan oleh Morgan (2020) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat hanya dapat berkelanjutan apabila individu dan institusi lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Dalam konteks KWT, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan peningkatan literasi kewirausahaan akan memperkuat daya saing kelompok di sektor pertanian rumah tangga (Fitriani et al., 2022).

Selain itu, penelitian terbaru oleh Nugraha dan Putri (2023) menegaskan bahwa integrasi antara pelayanan publik yang efektif dan pengembangan SDM perempuan desa memiliki korelasi positif terhadap peningkatan ketahanan pangan keluarga. Artinya, keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam pertanian rumah tangga tidak hanya bergantung pada semangat individu, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah memberikan dukungan kelembagaan, pelatihan, dan akses sumber daya.

Kajian ini menarik untuk dilakukan karena mengintegrasikan tiga aspek penting dalam pembangunan desa, yaitu pemberdayaan perempuan melalui KWT, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan SDM sebagai strategi menuju ketahanan pangan rumah tangga berbasis pekarangan. Fenomena ini juga sejalan dengan program nasional Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian (2021), yang menekankan pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur tentang pemberdayaan perempuan di sektor pertanian dan kontribusi aplikatif bagi pemerintah daerah serta lembaga pendamping masyarakat desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peningkatan pelayanan publik dan kualitas sumber daya manusia berperan dalam pemberdayaan KWT Puspita Tani di Desa Pejagoan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Menurut Hasibuan (2019), pengembangan SDM adalah usaha meningkatkan kemampuan teoretis, konseptual, moral, dan keterampilan kerja untuk mencapai kinerja optimal. Dalam konteks pertanian, SDM yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam secara efektif, memanfaatkan teknologi tepat guna, dan berinovasi dalam menciptakan produk bernilai tambah.

Menurut Kementerian Pertanian (2020), menyatakan bahwa KWT adalah salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga (KPRT), karena perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan konsumsi, produksi pangan, dan gizi keluarga. Ketahanan pangan sendiri didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga secara cukup, aman, merata, dan terjangkau untuk hidup aktif dan sehat (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan peran KWT Puspita Tani dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga melalui pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali pengalaman, persepsi, serta dinamika sosial yang terjadi di dalam kelompok secara holistik (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka, tetapi pada makna dan proses sosial yang berlangsung.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, yang merupakan lokasi berdirinya KWT Puspita Tani.

Kelompok ini berada di bawah naungan Tim Penggerak PKK Desa Pejagoan dan aktif dalam kegiatan pertanian pekarangan serta pelatihan pengembangan usaha tani rumah tangga.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, terdiri atas:

1. Ketua KWT Puspita Tani – sebagai informan kunci yang memahami manajemen dan dinamika kelompok.
2. Sekretaris dan Bendahara KWT – memahami administrasi dan perencanaan kegiatan.
3. Tiga anggota lama KWT (bergabung sejak awal 2022) – memberikan pandangan tentang perubahan dan dampak program.
4. Tiga anggota baru KWT (bergabung tahun 2024–2025) – menggambarkan proses adaptasi dan manfaat program bagi anggota baru.
5. Kepala Desa Pejagoan – mewakili pemerintah desa sebagai penyedia layanan publik.
6. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) – sebagai pendamping teknis dari Dinas Pertanian.

Peran informan adalah memberikan informasi faktual dan pengalaman pribadi terkait proses pelayanan publik, pelatihan, serta dampaknya terhadap ketahanan pangan rumah tangga.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid, digunakan tiga teknik utama.

1. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) dilakukan kepada seluruh informan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi anggota KWT dalam mengikuti program pembinaan dan pelatihan.
2. Observasi partisipatif Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan KWT, seperti pelatihan, kegiatan menanam, pengolahan hasil panen, dan pemasaran produk. Observasi

dilakukan untuk melihat perilaku nyata dan interaksi sosial anggota kelompok dalam konteks kegiatan pertanian rumah tangga.

3. Dokumentasi
Meliputi pengumpulan data sekunder berupa arsip kegiatan, foto dokumentasi pelatihan, notulen rapat kelompok, serta laporan kegiatan KWT dari PKK Desa dan Dinas Pertanian. Data ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang mencakup tiga tahap utama.

1. Reduksi data (*data reduction*) – menyaring dan menyeleksi data relevan dari hasil wawancara dan observasi.
2. Penyajian data (*data display*) – menyusun data dalam bentuk naratif dan tabel agar pola dan hubungan antar variabel dapat terlihat.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi – menarik temuan berdasarkan data lapangan dan menghubungkannya dengan teori serta penelitian terdahulu.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi antar-informan dan antar-metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KWT Puspita Tani Desa Pejagoan

Desa Pejagoan merupakan salah satu desa di Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, yang memiliki potensi pertanian cukup besar. Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik sebagai petani

lahan sawah maupun pekarangan. Dalam upaya memperkuat peran perempuan di bidang pertanian, pemerintah desa membentuk KWT, yaitu KWT Puspita Tani, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan data Desa Pejagoan, KWT Puspita Tani berdiri sejak tahun 2022 dan beranggotakan sekitar 30 orang perempuan dari berbagai dusun dan berada di bawah naungan Tim Penggerak PKK Desa Pejagoan. KWT Puspita Tani sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan desa melalui kegiatan produktif berbasis pertanian keluarga. Kegiatan utama kelompok ini meliputi pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran, tanaman obat keluarga (TOGA) dan ternak kecil, seperti ikan lele. Selain itu, kelompok juga melakukan kegiatan penjualan hasil panen yang bernilai ekonomi dan menjadi tambahan pendapatan bagi anggota.

KWT Puspita Tani merupakan salah satu kelompok aktif di Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Kelompok ini beranggotakan perempuan-perempuan desa yang memiliki semangat tinggi dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk kegiatan pertanian produktif.

Sebagai kelompok binaan PKK Desa Pejagoan, KWT Puspita Tani melaksanakan berbagai kegiatan yang sejalan dengan program Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman). Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi juga mencakup aspek gizi, lingkungan, dan ekonomi rumah tangga.

Selain kegiatan produksi pangan, KWT juga mengembangkan kegiatan ekonomi produktif seperti penjualan hasil panen, pengolahan produk sederhana, dan promosi di bazar desa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Tabel 1.

Profil Keanggotaan KWT Puspita Tani Desa Pejagoan (2025)

Kategori Anggota	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Lama Keanggotaan	Dampak Ekonomi
Anggota Lama	19	63%	>3 tahun	Peningkatan pendapatan 25–30%
Anggota Baru	11	37%	<2 tahun	Peningkatan pendapatan 10–15%
Total	30	100%	—	—

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi lapangan, 2025

Berdasarkan hasil wawancara, anggota lama lebih merasakan dampak signifikan dari kegiatan kelompok karena mereka telah mengikuti lebih banyak kegiatan pembinaan dan pendampingan. Anggota baru masih dalam tahap adaptasi, namun menunjukkan antusiasme tinggi dalam menerapkan praktik pertanian berkelanjutan di rumah masing-masing.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap KWT

KWT Puspita Tani berdiri melalui dukungan PKK, Pemerintah Desa Pejagoan dan Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen. Anggota KWT rutin mengikuti pelatihan-pelatihan dan *event/ekspo/bazar*, baik tingkat desa maupun Kabupaten. PKK berperan penting sebagai penghubung antara KWT dengan instansi atau lembaga pelatihan terkait. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan pertanian berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Ibu Mulyani yang merupakan salah satu anggota KWT Puspita Tani menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dan dinas pertanian terhadap KWT cukup signifikan. Pemerintah memberikan pelayanan publik dalam bentuk pelatihan, bantuan sarana produksi, dan pendampingan teknis melalui penyuluh pertanian lapangan. Pelatihan yang diberikan mencakup cara menanam sayuran secara vertikultur, pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik, dan manajemen usaha tani rumah tangga.

Pelayanan publik yang diterima oleh KWT Puspita Tani melibatkan berbagai aspek yang mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas kelompok. Berikut bentuk pelayanan publik yang diberikan.

1. Pelayanan Pembinaan dan Penyuluhan

Pemerintah desa bersama penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian secara rutin melakukan kegiatan penyuluhan sebagai berikut.

- a. Teknik budidaya tanaman hortikultura di lahan sempit (pekarangan).
- b. Penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati.
- c. Manajemen pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.
- d. Pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi kompos.

Pelayanan ini meningkatkan pemahaman anggota KWT terhadap inovasi pertanian yang ramah lingkungan dan efisien.

2. Pelayanan Fasilitasi Sarana dan Prasarana

KWT Puspita Tani mendapatkan dukungan antara lain sebagai berikut.

- a. Bantuan bibit sayuran dan tanaman toga.
- b. Alat pertanian sederhana (*polybag*, *sprayer*, komposter).
- c. Pembuatan demplot percontohan pekarangan produktif.

Berikut data bantuan awal berupa sarana dan prasarana pertanian dari Pemerintah Desa untuk KWT Puspita Tani.

Tabel 2.

Dukungan Sarana dan Prasarana bagi KWT Puspita Tani

Jenis Bantuan	Deskripsi	Sumber
Benih Bibit	Bibit sayuran atau buah-buahan yang bisa ditanam lahan KWT dan berkelanjutan ke pekarangan rumah untuk konsumsi mandiri.	Pemerintah Desa Pejagoan
Alat pertanian	Alat-alat seperti sekop, cangkul, dan peralatan berkebun lainnya untuk memudahkan kegiatan bercocok tanam.	Pemerintah Desa Pejagoan
Rumah Bibit	Menyediakan rumah bibit sederhana untuk penyemaian benih, tempat alat pertanian dan lain sebagainya	Pemerintah Desa Pejagoan
Pupuk Kompos	Sediaan pupuk untuk menyuburkan tanah dan tanaman yang akan dibiayayakan.	Pemerintah Desa Pejagoan
Media Tanam	Media tanam digunakan untuk penyemaian benih dan tanaman yang ditanam dalam <i>polybag</i>	Pemerintah Desa Pejagoan
Edukasi dan pelatihan	Pelatihan mengenai teknik bertanam, pengolahan lahan, dan perawatan	Pemerintah Desa Pejagoan dan Dinas Pertanian

	tanaman agar hasil panen maksimal.	
Alat kebersihan	Alat kebersihan akan membantu lahan KWT lebih bersih dan tertata rapi	Pemerintah Desa Pejagoan
Sumber: Data hasil dokumentasi kegiatan KWT dan Pemerintah Desa Pejagoan (2025).		

Tabel bantuan awal untuk KWT Puspita Tani berupa bantuan non-tunai seperti bibit tanaman, pupuk, alat pertanian sederhana (sekop, cangkul), dan edukasi pertanian. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan memberdayakan perempuan di bidang pertanian. Bantuan ini dapat diperoleh dari Pemerintah Desa Pejagoan. Dukungan sarana dan prasarana ini memperkuat kemampuan KWT dalam mempraktikkan teknik pertanian berkelanjutan di lingkungan rumah tangga.

3. Pelayanan Administrasi dan Kelembagaan
Pemerintah desa juga memberikan pelayanan administratif seperti:
- a. pengesahan legalitas kelompok (SK Kepala Desa),
 - b. pelatihan manajemen organisasi dan laporan kegiatan, dan
 - c. fasilitasi akses terhadap program bantuan dan kemitraan dengan dinas terkait.

Melalui layanan ini, KWT Puspita Tani memperoleh pengakuan formal sebagai mitra pembangunan desa dalam sektor pertanian.

4. Pelayanan Pemasaran dan Pengembangan Produk

Pelayanan publik juga diwujudkan dalam bentuk pendampingan pemasaran produk olahan hasil pertanian, yang untuk sementara masih dipasarkan dalam bentuk sayuran. Rencana ke depannya akan dipasarkan dalam bentuk produk olahan seperti keripik bayam, minuman herbal, dan sayur organik yang dikemas menarik.

Pemerintah desa bekerja sama dengan dinas pertanian dan UMKM untuk membuka akses ke pameran, bazar, dan media promosi online. Dengan layanan ini, produk KWT Puspita Tani tidak hanya dikonsumsi lokal tetapi juga mulai dikenal di wilayah sekitar Kebumen.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada KWT Puspita Tani memberikan dampak nyata bagi

perkembangan kelompok dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan. Melalui berbagai kegiatan pembinaan, anggota KWT memiliki keterampilan baru dalam bertani dan berwirausaha. Mereka mampu mengelola pertanian rumah tangga secara mandiri dan inovatif.

Pelayanan publik yang baik terbukti meningkatkan kapasitas anggota dalam bertani dan berwirausaha. Hal ini sejalan dengan teori *Responsive Public Service* (Denhardt & Denhardt, 2015), yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Penguatan Kemandirian Ekonomi Perempuan. Dengan hasil panen dan produk olahan yang dijual, anggota KWT memperoleh tambahan penghasilan. Hal ini meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa sehingga terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Pemanfaatan pekarangan secara optimal membuat keluarga tidak lagi tergantung sepenuhnya pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sayuran, rempah, dan bahan makanan dasar dapat diperoleh dari hasil tanam sendiri.

Terjalannya kolaborasi antar stakeholder. Kualitas pelayanan publik yang baik mendorong terbentuknya hubungan sinergis antara pemerintah desa, penyuluh, dan masyarakat. Hal ini mempercepat proses pemberdayaan dan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan. Faktor pendukung antara lain sebagai berikut:

- a. dukungan pemerintah desa dan Dinas Pertanian yang konsisten,
- b. antusiasme dan partisipasi tinggi dari anggota KWT,
- c. adanya program nasional ketahanan pangan berbasis rumah tangga,
- d. ketersediaan lahan pekarangan yang cukup luas di lingkungan perdesaan.

Faktor penghambat yang ada antara lain sebagai berikut.

- a. Keterbatasan modal usaha dan alat pengolahan hasil pertanian.

- b. Belum optimalnya pemasaran digital produk KWT.
- c. Ketergantungan sebagian anggota pada bantuan pemerintah.
- d. Kurangnya regenerasi anggota muda di dalam KWT.

Untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap KWT Puspita Tani, berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan.

1. Digitalisasi layanan pertanian desa, seperti informasi pelatihan dan pemasaran melalui media sosial.
2. Program pendampingan intensif yang berfokus pada kewirausahaan dan manajemen keuangan kelompok.
3. Penguatan jejaring kemitraan antara KWT, lembaga pendidikan, dan sektor swasta agar produk pertanian rumah tangga memiliki nilai tambah.
4. Monitoring dan evaluasi berkala dari pemerintah desa terhadap efektivitas pelayanan publik dan keberlanjutan kegiatan KWT.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Desa Pejagoan terhadap KWT Puspita Tani telah membawa perubahan positif pada peningkatan kapasitas perempuan desa, ketahanan pangan rumah tangga, dan ekonomi lokal. Layanan publik yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan terbukti mampu menjadi fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian pekarangan.

Namun, pelayanan publik belum sepenuhnya optimal. Sebagian anggota KWT menyampaikan bahwa frekuensi pelatihan masih terbatas dan perlu keberlanjutan agar keterampilan yang diperoleh dapat terus berkembang. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya peningkatan dalam akses informasi dan bantuan modal usaha mikro pertanian, karena masih banyak kegiatan produktif yang terkendala peralatan dan modal kerja.

Meskipun demikian, pelayanan publik yang telah dilakukan memiliki dampak positif terhadap motivasi dan semangat anggota KWT. Mereka menjadi lebih percaya diri, mandiri, serta memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga ketahanan pangan keluarga melalui pengelolaan pekarangan rumah.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota KWT

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam keberhasilan setiap program pemberdayaan masyarakat, termasuk KWT. Dalam konteks KWT Puspita Tani Desa Pejagoan, pengembangan SDM berperan penting untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola kegiatan pertanian, kewirausahaan, serta memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Pemberdayaan, perempuan melalui KWT mencakup penyadaran, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kerjasama kelompok. Anggota KWT tidak hanya dituntut memiliki keterampilan teknis dalam bertani, tetapi juga kemampuan manajerial, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pertanian modern. Oleh karena itu, upaya pengembangan SDM dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.

Upaya pemberdayaan dalam kelompok ini meliputi peningkatan kesadaran, pemberian pelatihan teknis, dan peningkatan keterampilan dalam membangun kapasitas. melalui kerja sama kelompok. Selain itu, KWT berperan dalam pengenalan tanaman baru dan peningkatan keterampilan anggota.

Peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor utama keberhasilan kegiatan KWT. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar anggota KWT memiliki latar belakang pendidikan menengah atas dan belum memiliki keterampilan teknis di bidang pertanian modern. Oleh karena itu, program pelatihan yang diberikan oleh dinas pertanian dan pemerintah desa berfokus pada peningkatan pengetahuan praktis, seperti:

1. teknik menanam sayuran secara organik,
2. pembuatan pupuk kompos dan pestisida nabati,
3. manajemen hasil panen,
4. pengelolaan air dan penggunaan media tanam vertikal,
5. penanaman tanaman obat keluarga (TOGA),
6. pengemasan dan pemasaran produk olahan.

Dampak dari peningkatan kapasitas SDM ini terlihat dari meningkatnya produktivitas lahan pekarangan dan variasi jenis tanaman yang dibudidayakan. Sebelum adanya pelatihan, sebagian besar pekarangan hanya ditanami tanaman hias atau dibiarkan kosong. Setelah

program pemberdayaan berjalan, pekarangan dimanfaatkan untuk menanam berbagai sayuran seperti cabai, bayam, kangkung, terong, dan tomat. Beberapa anggota bahkan berhasil menjual hasil panen mereka di pasar lokal.

Hasilnya, anggota mengalami peningkatan kemampuan bertani secara efisien, meningkatnya produktivitas lahan, dan tumbuhnya kesadaran kewirausahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Fitriani et al. (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM perempuan pedesaan berkontribusi langsung terhadap produktivitas pangan keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir kewirausahaan di kalangan perempuan desa. Kegiatan pendampingan dilakukan oleh tenaga penyuluh dan fasilitator desa untuk memantau penerapan hasil pelatihan di lapangan. Pendampingan ini bersifat partisipatif, di mana anggota KWT dapat berdiskusi langsung mengenai kendala dan solusi yang dihadapi dalam kegiatan pertanian.

Pendampingan yang berkelanjutan membantu memastikan bahwa ilmu yang diperoleh dari pelatihan dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan manfaat nyata bagi rumah tangga. Langkah ini bertujuan agar KWT mampu beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal.

Pengembangan SDM yang dilakukan secara sistematis memberikan dampak nyata bagi kemajuan KWT Puspita Tani, antara lain sebagai berikut.

1. **Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Anggota**
Anggota KWT kini lebih memahami teknik bertani modern, pengolahan hasil, serta strategi pemasaran. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
2. **Meningkatnya Kemandirian dan Rasa Percaya Diri**
Pelatihan dan pendampingan membuat anggota KWT lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan berani mencoba inovasi baru. Hal ini mengubah peran perempuan dari sekadar pelaku domestik menjadi penggerak ekonomi rumah tangga.

3. **Tumbuhnya Jiwa Kewirausahaan**
Melalui pelatihan kewirausahaan, beberapa anggota mulai merintis usaha kecil berbasis hasil pertanian rumah tangga. Mereka mampu mengelola produksi, keuangan, dan pemasaran secara sederhana namun efektif.
4. **Meningkatnya Solidaritas dan Kerja Sama Antar-Anggota**
Kegiatan kelompok yang dilakukan bersama-sama mempererat hubungan sosial antaranggota. Nilai gotong royong, saling berbagi pengalaman, dan dukungan moral menjadi kekuatan sosial yang mendukung keberlanjutan KWT.

Untuk memperkuat pengembangan SDM KWT Puspita Tani ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Digitalisasi pendidikan pertanian, seperti pelatihan daring dan video tutorial.
2. Program magang atau studi banding ke KWT unggulan di daerah lain.
3. Pelatihan diversifikasi produk agar hasil pertanian memiliki nilai tambah.
4. Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset dan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan.
5. Penerapan sistem kaderisasi anggota muda agar regenerasi berjalan baik.

Pengembangan SDM pada KWT Puspita Tani merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pemberdayaan perempuan dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kesadaran berwirausaha, perempuan desa tidak hanya menjadi pelaku pertanian, tetapi juga agen perubahan sosial dan ekonomi.

Kegiatan pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan yang dilakukan secara konsisten membuktikan bahwa investasi pada SDM perempuan pedesaan adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis keluarga dan memperkuat sektor pertanian lokal secara berkelanjutan.

Kontribusi KWT terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga

KWT Puspita Tani Desa Pejagoan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya ketahanan pangan rumah tangga berbasis pekarangan. Melalui berbagai kegiatan produktif dan inovatif, KWT ini berhasil memberdayakan anggotanya untuk

memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan.

Anggota KWT didorong untuk menanam aneka tanaman pangan seperti sayur-sayuran, cabai, tomat, kangkung, dan tanaman obat keluarga (TOGA), serta mengembangkan sistem pertanian organik sederhana dengan memanfaatkan pupuk kompos hasil olahan rumah tangga. Hasil dari kegiatan ini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan harian keluarga, sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga. Sebagian hasil panen bahkan dijual untuk menambah pendapatan keluarga, menjadikan kegiatan ini tidak hanya bernilai sosial dan ekologis, tetapi juga ekonomis.

Kegiatan pemanfaatan pekarangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anggota, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pangan lokal dan semangat gotong royong di masyarakat. Melalui pembinaan dari PKK Desa Pejagoan dan kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kebumen, anggota KWT mendapatkan bimbingan dalam hal teknik budidaya, pengolahan hasil, dan pengemasan produk agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Keberhasilan KWT Puspita Tani dalam menciptakan ketahanan pangan keluarga mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Pada bulan Agustus 2025, kelompok ini mendapat kunjungan monitoring dari Tim P2B (Pekarangan Pangan Bergizi) Polda Jawa Tengah, yang datang untuk melihat langsung implementasi program pekarangan bergizi yang telah dijalankan di bawah pembinaan PKK Desa Pejagoan.

Dalam kunjungan tersebut, tim monitoring memberikan apresiasi tinggi terhadap inovasi dan konsistensi para anggota KWT dalam mengelola lahan pekarangan menjadi sumber pangan bergizi bagi keluarga. Pengakuan tersebut semakin diperkuat dengan capaian prestasi KWT Puspita Tani yang berhasil meraih Juara II dalam Lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tingkat Kabupaten Kebumen. Penghargaan ini menjadi bukti konkret keberhasilan kelompok dalam mengintegrasikan peran perempuan, pelayanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.



Gambar 1.

Kunjungan monitoring dari Tim P2B (Pekarangan Pangan Bergizi) Polda Jawa Tengah

Tabel 3.

Dampak Keberadaan KWT terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Indikator Dampak	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Perubahan (%)
Pemenuhan kebutuhan pangan sendiri	45%	83%	+38%
Diversifikasi konsumsi sayuran	40%	78%	+38%
Penghematan pengeluaran pangan	-	15-25%	-
Pendapatan tambahan keluarga	-	+20%	-

Sumber: Hasil wawancara dan observasi lapangan, 2025.

Dampak keberhasilan ini juga meluas ke masyarakat sekitar. Banyak warga Desa Pejagoan yang terinspirasi untuk meniru langkah anggota KWT dalam memanfaatkan pekarangan rumahnya. Hal ini menciptakan efek domino positif, dimana budaya bercocok tanam dan konsumsi pangan sehat semakin meluas di tingkat desa. Dengan demikian, KWT Puspita Tani tidak hanya berperan sebagai wadah pemberdayaan perempuan, tetapi juga sebagai motor penggerak ketahanan pangan berbasis rumah tangga yang mengarah pada pembangunan pertanian berkelanjutan di pedesaan.

Ketahanan pangan rumah tangga merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap individu dalam keluarga baik dari sisi jumlah, mutu, maupun keberlanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada

kemampuan rumah tangga dalam mengakses dan memanfaatkannya secara optimal.

Dalam konteks pedesaan, peran perempuan sebagai pengelola konsumsi dan produksi pangan sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan KWT Puspita Tani menjadi salah satu motor penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

KWT Puspita Tani memiliki kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi antara produksi, pengolahan, dan konsumsi pangan. Peningkatan ketersediaan pangan anggota KWT secara aktif melakukan budidaya berbagai komoditas pertanian di lahan pekarangan seperti sayuran, cabai, tomat, ayam, kangkung, dan tanaman obat keluarga (TOGA).

Berawal dari kelompok masing-masing RW yang menyiapkan lahan untuk dikelola bersama-sama. KWT Puspita Tani memberikan bantuan berupa alat pertanian dan bibit pada setiap kelompok RW. Diharapkan nantinya akan berkelanjutan ke masing-masing anggotanya di pekarangan pribadi masing-masing. Memanfaatkan pekarangan rumah yang ada untuk menanam berbagai tanaman sayuran, yang hasilnya dikonsumsi sendiri sebagai bentuk ketahanan pangan mandiri.

Hasil panen tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan harian keluarga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Selain itu, KWT juga mendorong diversifikasi pangan dengan menanam umbi-umbian dan tanaman sumber karbohidrat alternatif untuk memperkaya pola konsumsi rumah tangga.

Melalui pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan keluarga, anggota KWT memperoleh tambahan pendapatan dari hasil penjualan produk pertanian dan olahan. Peningkatan pendapatan ini berdampak langsung pada kemampuan keluarga untuk mengakses pangan yang lebih berkualitas dan bergizi. KWT juga mengembangkan sistem tabungan kelompok yang dapat digunakan sebagai dana darurat ketika harga bahan pokok naik, sehingga rumah tangga tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditandai oleh meningkatnya kapasitas individu, partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, serta kemandirian dalam pengambilan keputusan dan

pengelolaan usaha. Dengan demikian, hasil pelatihan yang diikuti oleh KWT Puspita Tani tidak hanya berdampak pada peningkatan keterampilan teknis pertanian, tetapi juga memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anggota. Indikator keberhasilan pelatihan terlihat dari peningkatan kapasitas individu, munculnya semangat kewirausahaan, dan bertambahnya solidaritas kelompok.

Kegiatan KWT tidak berhenti pada produksi pangan, tetapi juga mencakup edukasi mengenai konsumsi gizi seimbang dan pengolahan makanan sehat. Melalui program dapur sehat keluarga, anggota KWT diajarkan cara mengolah hasil panen menjadi menu bergizi seperti sayur bening, tumisan hijau, atau minuman herbal alami. Kegiatan ini mendukung perubahan perilaku konsumsi rumah tangga menjadi lebih sehat dan bergizi tanpa bergantung pada makanan instan.

Sebagian hasil pertanian KWT diolah menjadi produk bernilai tambah seperti keripik bayam, minuman herbal jahe, dan sambal kemasan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperpanjang umur simpan produk pertanian agar tidak cepat rusak. Melalui inovasi tersebut, KWT turut menciptakan rantai pasok pangan lokal yang efisien dan berkelanjutan.

Berikut dampak Keberadaan KWT terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga antara lain sebagai berikut.

1. Pemenuhan kebutuhan pangan keluarga
Hasil pertanian pekarangan mampu mencukupi sebagian besar kebutuhan pangan keluarga sehari-hari. Dengan demikian, pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan dapat ditekan, sehingga dana dapat dialokasikan untuk keperluan lain seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan pendapatan keluarga
Produk olahan hasil pertanian memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Beberapa anggota bahkan telah mampu memasarkan produk ke warung, pasar lokal, hingga media sosial, yang menunjukkan tumbuhnya kemandirian ekonomi perempuan desa.
3. Terwujudnya pola konsumsi sehat dan beragam
Anggota KWT menjadi lebih sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Mereka mengatur menu keluarga

dengan bahan alami hasil tanam sendiri yang lebih sehat, segar, dan bebas bahan kimia.

4. Penguatan solidaritas sosial dan gotong-royong

Kegiatan KWT yang dilakukan bersama-sama, seperti kerja bakti menanam, panen bersama, dan berbagi hasil panen, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota. Ini menjadi fondasi sosial penting dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat lokal.

Meskipun kontribusi KWT Puspita Tani cukup signifikan, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan lahan pekarangan produktif untuk seluruh anggota, fluktuasi cuaca dan iklim ekstrem yang mempengaruhi hasil panen, kurangnya akses terhadap permodalan dan teknologi pascapanen, serta minimnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian keluarga. Tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan tani dan peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Agar kontribusi KWT terhadap ketahanan pangan semakin optimal, beberapa langkah strategis dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses anggota terhadap sumber permodalan dan sarana produksi.
2. Mengintegrasikan program KWT dengan ketahanan pangan desa.
3. Mengembangkan jejaring pemasaran berbasis digital.
4. Melibatkan generasi muda dan pelajar dalam kegiatan pertanian rumah tangga.
5. Mendorong inovasi produk pangan lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dengan strategi tersebut, diharapkan KWT Puspita Tani dapat menjadi model pemberdayaan perempuan desa yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan berbasis keluarga. Keberadaan KWT Puspita Tani membuktikan bahwa kelompok perempuan desa memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Melalui kegiatan pertanian pekarangan, pengolahan pangan, dan edukasi gizi, KWT mampu menciptakan sistem pangan yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.

Partisipasi aktif perempuan dalam produksi dan konsumsi pangan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian ekonomi

keluarga serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Ketahanan pangan rumah tangga di Desa Pejagoan mengalami peningkatan sejak adanya kegiatan KWT. Berdasarkan data wawancara dan pengamatan lapangan, terdapat beberapa dampak nyata yang dirasakan.

1. Pemenuhan kebutuhan pangan keluarga secara mandiri
Sebagian besar anggota KWT tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar untuk kebutuhan sayur-mayur harian karena dapat memanfaatkan hasil pekarangan sendiri.
2. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan
Keluarga anggota KWT mengonsumsi lebih banyak sayuran segar dan tanaman obat keluarga, yang berdampak positif terhadap gizi rumah tangga.
3. Penghematan pengeluaran rumah tangga
Rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan pangan berkurang 15–25% setelah memanfaatkan pekarangan secara produktif.
4. Peningkatan pendapatan tambahan
Hasil panen berlebih dari pekarangan dijual ke tetangga atau pasar lokal, memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.

Dengan demikian, kegiatan KWT bukan hanya berfungsi sosial, tetapi juga berdampak ekonomi dan gizi yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan melalui KWT mampu memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat rumah tangga.

Tabel 4.
 Perbandingan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Posisi Penelitian Ini
Hidayat & Sari (2020)	Pemberdayaan KWT secara umum	KWT berperan dalam konsumsi pangan sehat	Menambahkan aspek pelayanan publik dan SDM
Fitriani et al. (2022)	Pengembangan SDM perempuan tani	Peningkatan kapasitas SDM berdampak pada produktivitas	Diperluas dengan analisis dampak ekonomi
Kusnandar & Wulandari (2023)	Peran perempuan dalam ketahanan pangan	Dukungan pemerintah berpengaruh signifikan	Menambahkan analisis perbedaan anggota baru-lama dan

Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Utama	Posisi Penelitian Ini
			implikasi praktis

Temuan penelitian ini mengonfirmasi adanya keterkaitan kuat antara kualitas pelayanan publik, peningkatan SDM, dan ketahanan pangan. Pelayanan publik yang baik memberikan ruang partisipasi dan dukungan nyata kepada kelompok tani perempuan. SDM yang terlatih dan berpengetahuan memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian. Sinergi antara keduanya menghasilkan dampak langsung terhadap ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan keluarga.

Dalam konteks Desa Pejagoan, peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan pendamping sangat menentukan keberlanjutan kegiatan KWT. Dukungan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan lanjutan, akses permodalan, dan jejaring pemasaran akan memperkuat posisi KWT sebagai motor penggerak ketahanan pangan lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan KWT melalui peningkatan pelayanan publik dan SDM merupakan strategi efektif dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga sekaligus memperkokoh sektor pertanian pedesaan.

Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan SDM memiliki peran penting dalam pemberdayaan KWT di Desa Pejagoan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dinas pertanian, anggota KWT memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan lahan pekarangan, pembuatan pupuk organik, serta pengolahan hasil pertanian.

Pengembangan SDM anggota KWT berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian rumah tangga. Perempuan yang tergabung dalam KWT menjadi lebih terampil, mandiri, dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Kegiatan KWT berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan rumah tangga di

Desa Pejagoan. Pemanfaatan lahan pekarangan mampu menekan pengeluaran pangan, meningkatkan diversifikasi konsumsi, serta menambah pendapatan rumah tangga melalui penjualan hasil panen dan produk olahan.

Sinergi antara pelayanan publik yang berkualitas dan SDM yang berdaya menjadi kunci utama keberhasilan pemberdayaan masyarakat tani perempuan. KWT Desa Pejagoan berhasil menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat mendorong ketahanan pangan berbasis rumah tangga yang berkelanjutan.

Refleksi kebijakan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya integrasi program pemberdayaan KWT dalam perencanaan pembangunan desa, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis kebutuhan kelompok serta pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, lembaga penyuluhan, dan PKK diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas dampak positif program ini pada ketahanan pangan masyarakat secara lebih luas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan agar pemerintah desa bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada KWT Puspita Tani maupun kelompok serupa di wilayah lain. Pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tani perempuan perlu diarahkan pada aspek peningkatan kapasitas teknis, manajerial, dan kewirausahaan agar anggota KWT mampu mengelola potensi pertanian pekarangan secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, diperlukan keberlanjutan program pendampingan dan pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga pada aspek pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Kegiatan pemberdayaan KWT juga sebaiknya diintegrasikan secara lebih sistematis dalam kebijakan pembangunan desa melalui dukungan anggaran dan regulasi yang berpihak pada penguatan peran perempuan dalam sektor pertanian.

Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan tinggi dan penyuluh pertanian diharapkan dapat memperluas jejaring kolaborasi untuk penelitian terapan dan inovasi teknologi tepat guna bagi pertanian rumah tangga. Dengan demikian, KWT dapat berfungsi tidak hanya sebagai kelompok produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran masyarakat (*community learning center*) yang berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pertanian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewi, A. P., & Rahmawati, N. (2022). Peran kelompok wanita tani dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga di wilayah pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 18(2), 115–128. <https://doi.org/10.21082/jsep.v18n2.2022>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Pedoman umum pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) dalam pengembangan pertanian berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mustika, D., & Fadilah, R. (2023). Inovasi pelayanan publik di sektor pertanian melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 42–56. <https://doi.org/10.25077/jakpi.9.1.42-56.2023>
- Nugroho, S., & Lestari, D. (2024). Kualitas sumber daya manusia sebagai determinan produktivitas pertanian rumah tangga. *Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 10(1), 67–79. <https://doi.org/10.15294/jppm.v10i1.2024>
- Prasetyo, A. H., & Sari, P. R. (2021). Analisis pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. *Jurnal Agrisocionomics*, 5(3), 188–200.
- Suryani, E., & Wibowo, H. (2023). Model pemberdayaan masyarakat berbasis pekarangan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Ketahanan Pangan dan Gizi*, 12(1), 33–47. <https://doi.org/10.33512/jkpg.v12i1.2023>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
- Yuliani, R., & Handayani, T. (2020). Sinergi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan ekonomi pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 85–97.

BIODATA PENULIS

Penulis bernama lengkap Eka Wati Setiyaningsih, lahir di Kebumen, 6 November 1985. Sarjana Pendidikan Agama Islam IAINU Kebumen tahun 2015 dengan predikat Cumlaude Mahasiswa Terbaik ke II. Sekarang aktif mengajar di SD Negeri 4 Kedawung mengampu Mapel Pendidikan Agama Islam. Prestasi yang pernah diraih adalah mendapatkan Juara ke empat Lomba PTT MAPSI tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2021. Masuk kategori 10 penulis terbaik dalam lomba menulis “Cultural Diversity Geopark Kebumen” dalam rangka hari Guru Nasional 2023. Diterbitkannya artikel dalam Jurnal Litbang dengan judul Artikel “Batik Kebumen Memukau Dunia” Tahun 2024. Masuk 10 artikel terbaik dalam Jurnal Semarak Kabumian Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024 dan diterbitkan dalam buku Geopark Kebumen dengan judul artikel “Tranformasi Industri Genteng Soka Kebumen”.



ISSN 3026-4804



9

773026

480040